

**ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

K. Titis Kurniawati

NIM : 002114250

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2007

S k r i p s i

ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Oleh:

K. Titis Kurniawati

NIM: 002114250

Telah Disetujui oleh:

Pembimbing I:



Firma Sulistiyowati, S.E, M.Si.

Tanggal: 28 Agustus 2007



Pembimbing II:



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M, Akt.

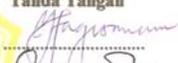
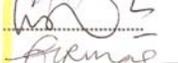
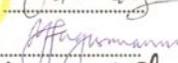
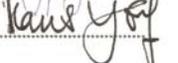
Tanggal: 30 Agustus 2007

Skripsi
**ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
K. Titis Kurniawati
NIM: 002114250

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 18 September 2007
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M, Akt.	
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E, M.Si.	
Anggota	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M, Akt.	
Anggota	Ir. Drs. Hansiadi Y.H., M.Si., Akt.	

Yogyakarta, 29 September 2007
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma

Dekan,

Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

*Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan dan
usaha dari manusia itu sendiri*

*Dia selalu punya maksud yang indah bagi kita
Keiklasan Hati, Rasa syukur, dan usaha yang diiringi
dengan doa akan menuntun kita kepada kebahagiaan*

Kupersembahkan untuk:

Yesus Kristus dan Bunda Maria

Ayah dan Ibuku tercinta

Adik-adik ku tersayang

Mas Denny

UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

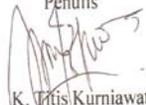
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang) dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 18 September 2007 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 19 September 2007

Penulis

K. Titis Kurniawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Dr. Ir. P. Wiryono P.,S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- b. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- c. Ir. Drs. Hansiadi YH. M.Si., Akt., selaku Kaprodi Akuntansi.
- d. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., selaku Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- e. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, serta saran dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- f. Semua dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang telah membantu penulis selama ini.

- g. Obaja, S.E, M.Si., selaku pimpinan Dispenda Kabupaten Bengkayang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
- h. Para Staf Dispenda yang telah banyak membantu dan mencarikan data serta memberikan informasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
- i. Bapak Sigit Widaryanto dan Ibu Sukemi Lestari atas kasih sayang, doa restu, kesabaran dalam menghadapi keluh kesah ananda, dan segala pengorbanan yang telah diberikan.
- j. Adik-adik ku tersayang: Dik Wawan, Ileh, Iwi dan Yayan yang selalu memberikan doa, semangat, dan keceriaan.
- k. Kakak-kakak ku terkasih: Mbak Iq, Kak nunx, Kak Anton, Mbak Indrie, Mb' Rini.
- l. Mas Denny yang selalu mendorong untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, kasih sayang, dan doanya.
- m. Sahabat-sahabat ku: Vika, Uwie, Dhede, Niken, Dewie, Atik, Santi, terimakasih atas semangat yang kalian berikan.
- n. Teman-teman sepermainan ku: Uliel, Gembur, Cenny, Jenonx, Ibnoe, Eka, Tiko, Dion, KT, Ucie, Anie, Agie, dan teman-teman JPN. Terima kasih atas dorongan dan bantuan sampai selesainya skripsi ini.
- o. Teman-teman seperjuangan ku: Hugo, Antok, Tunjung, Wisan, Koko Chimonx, Agus, Palkon, Beler, Karjo, Yono.

p. Teman-teman kos ku: Dyah, Mita, Yessy, Aie, Titik, Ria, Lieya, Neko, Lia Winda, Nova, terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca semua.

Yogyakarta, 29 September 2007

Penulis

K. Titis kurniawati

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GRAFIK	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Otonomi Daerah	8
B. Pengertian Otonomi Daerah	10

	C. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah	11
	D. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	13
	E. Sumber- sumber Penerimaan Daerah	14
	F. Keuangan Daerah	23
	G. Efektivitas	25
	H. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah	26
BAB 111	METODE PENELITIAN	28
	A. Jenis Penelitian	28
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
	C. Subyek dan Obyek Penelitian	28
	D. Jenis Data	29
	E. Data Yang Dicari	29
	F. Teknik Pengumpulan Data	29
	G. Teknik Analisis Data	30
BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH KAB. BENGKAYANG	39
	A. Geografi	39
	B. Pemerintahan	42
	C. Penduduk dan Ketenagakerjaan	45
	D. Sosial	50
	E. Pertanian	57
	F. Industri, Listrik, dan Air Minum	65
	G. Transportasi dan Komunikasi	68
	H. Keuangan	70

	I. Pendapatan Regional	75
BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	77
	A. Deskripsi Data	77
	B. Analisis Data	78
	C. Pembahasan	96
BAB VI	PENUTUP	98
	A. Kesimpulan	98
	B. Keterbatasan Penelitian	99
	C. Saran	100
	DAFTAR PUSTAKA	102
	LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	27
Tabel 2	Contoh Tabel Analisis Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah	31
Tabel 3	Contoh Tabel Realisasi dan Pertumbuhan PAD dengan Angka Indeks	37
Tabel 4	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan, Tahun 2001-2005	47
Tabel 5	Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid, Menurut Jenis Sekolah Tahun 2005	52
Tabel 6	Realisasi Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Di Kabupaten Bengkayang Tahun 2002-2005	66
Tabel 7	Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2003	72
Tabel 8	Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2004	72
Tabel 9	Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2005	73
Tabel 10	Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2003	73
Tabel 11	Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004	74
Tabel 12	Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2005	74
Tabel 13	Realisasi PAD dan TPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005	78
Tabel 14	Kontribusi PAD terhadap TPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005	79
Tabel 15	Realisasi dan Target PAD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005	81
Tabel 16	Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005	82
Tabel 17	Realisasi PAD dan TPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005	84
Tabel 18	Persentase PAD terhadap TPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005	85

Tabel 19	PAD dan Dana Bagi Hasil dan TPD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2003-2005	86
Tabel 20	Persentase PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap TPD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2003-2005	87
Tabel 21	PAD dan Pengeluaran Rutin Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2003-2005	88
Tabel 22	Persentase PAD terhadap Pengeluaran Rutin Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005	89
Tabel 23	PAD dan Dana Bagi Hasil dan TPD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2003-2005	91
Tabel 24	Persentase PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengeluaran Rutin Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2003-2005	92
Tabel 25	Pendapatan Transfer dan TPD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2003-2005	93
Tabel 26	Persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2003-2005	94
Tabel 27	Realisasi PAD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2003-2005	94
Tabel 28	Pertumbuhan PAD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2003-2005	95

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik I	Piramida Penduduk Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 48

ABSTRAK

ANALISIS KEMAMPUAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang

K. Titis Kurniawati
NIM: 002114250
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bengkayang. Latar belakang penelitian ini adalah Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara maksimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Pendapatan asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Jenis penelitian adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah Rasio dan Angka Indeks.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah efektif. Walau demikian, pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkayang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dan belum mampu untuk melaksanakan otonomi daerah karena kontribusi dana pusat terhadap penerimaan daerah rata-rata setiap tahunnya mencapai 78,29%. Ini berarti, proporsi penerimaan daerah paling tinggi berasal dari alokasi dana pemerintah pusat.

ABSTRACT

ANALYSIS ON THE REGIONAL ORIGINAL REVENUE CAPABILITY IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY

A Case Study in the Government of Bengkayang Regency

K. Titis Kurniawati

Student Registration Number: 002114250

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2007

The purpose of this research was to know the capability of regional original revenue in the implementation of regional autonomy in Bengkayang Regency. The background of this research is that the operation of regional governmental function will be conducted maximally if the operation of governmental concerns were followed by giving the appropriate income sources to the region. The regional original revenue should become the biggest part in mobilizing the operational funds of Regional Government.

The type of this research was case study. The data were gained by conducting interview and documentation. The techniques of data analysis which was used were ratio and index number.

The result of this research revealed that the performance of regional government in collecting the regional original revenue was already effective. However, the regional original revenue of Bengkayang Regency had not been able to fulfill the necessities of its region and had not been able to implement the regional autonomy because of the contribution of central funds toward the average regional income annually reached 78,29%. It meant that highest proportion of regional income was resulted from the allocation of central government's funds.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian daerah integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub-sistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Tuntutan reformasi di segala bidang yang didukung oleh seluruh masyarakat membawa dampak terhadap keuangan pemerintah pusat dan daerah. Perubahan yang terjadi baik yang dirasakan positif maupun negatif mengharuskan semua pihak melakukan "*adjustment*". Salah satu dari sekian banyak reformasi yang membawa suatu perubahan yang signifikan dan memerlukan banyak "*adjustment*" adalah reformasi hubungan pemerintah pusat dan daerah yang lebih dikenal dengan "otonomi daerah". Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi

atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara maksimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Semua sumber Keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber Keuangan Daerah. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA; serta adanya perkembangan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara, menyebabkan terjadinya perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh dalam sistem Keuangan Negara. Dengan Demikian, UU No. 25 Tahun 1999 perlu diperbaharui serta diselaraskan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan UU No. 22 Tahun 1999 diperbaharui serta diselaraskan dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan amanat UUD Negara RI tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diselenggarakan

untuk memberi wewenang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan dan pengeluaran serta analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil, dan diharapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap struktur penerimaan daerah di Kabupaten Bengkayang dilihat dari kontribusi PAD dan efektivitas PAD?
2. Bagaimana kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan otonomi daerah?
3. Bagaimanakah pertumbuhan PAD dari tahun 2003-2005?

C. Batasan Masalah

Kemampuan suatu daerah untuk berotonomi dapat diketahui dengan melihat tolok ukur dan indikator yang ada. Menurut Widjaja (2001: 39), Tolok ukur ini adalah merupakan faktor-faktor pokok, penunjang, dan khusus yang antara lain sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pokok yang terdiri dari:
 - a. Kemampuan PAD/Keuangan
 - b. Kemampuan aparatur
 - c. Kemampuan partisipasi masyarakat
 - d. Kemampuan ekonomi
 - e. Kemampuan demografi
 - f. Kemampuan organisasi dan administrasi

2. Faktor-faktor penunjang yang terdiri dari:
 - a. Faktor geografi
 - b. Faktor sosial budaya
3. Faktor-faktor khusus yang terdiri dari:
 - a. Sosial politik
 - b. Pertahanan dan keamanan
 - c. Penghayatan keagamaan

Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi kemampuan untuk berotonomi, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat peranan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap struktur penerimaan APBD di Kabupaten Bengkayang dilihat dari kontribusi PAD dan efektivitas PAD.
2. Melihat bagaimana kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) dalam melaksanakan otonomi daerah.
3. Melihat pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun 2003-2005.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kemampuan daerah dalam menghadapi otonomi daerah, dan menggugah semangat Pemerintah Daerah untuk lebih memberdayakan potensi yang ada di Kabupaten Bengkayang.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan.

3. Bagi Penulis

Mendapatkan kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktek sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk penelitian ini dikelompokkan menjadi enam bab:

Bab I. Pendahuluan

Di dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori dan Kajian Pustaka

Di dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan penelitian dan pembahasan selanjutnya, serta landasan bagi penulis dalam mengolah data.

Bab III Metode Penelitian

Di dalam bab ini akan diuraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data, data yang dicari, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Gambaran Umum Kab. Bengkayang

Dalam bab ini akan diuraikan tentang keadaan geografi Kabupaten Bengkayang, pemerintahan Kabupaten Bengkayang, penduduk dan ketenagakerjaan, keadaan sosial, dan pendapatan regional Kabupaten Bengkayang.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil temuan lapangan yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan.

Bab VI Penutup

Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan sebagai hasil dari analisis data dan pembahasan, keterbatasan penelitian, saran bagi Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Pemberian kedudukan propinsi sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Untuk memelihara hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah Kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
3. Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana yang diatur atas undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut telah memberi angin segar kepada daerah untuk mengelola keuangan sendiri dengan lebih otonom, karena yang lebih mengerti persoalan daerahnya adalah pemerintah daerah itu sendiri.

Peran pemerintah pusat di era otonomi daerah ini adalah lebih banyak pada hal yang berkaitan dengan penetapan kebijakan nasional dan

pengendalian terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan tidak strategis, selebihnya sudah harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efisien dan efektif, demokratis, mendorong peran serta masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan, serta mampu mengembangkan segenap potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan kata lain otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemampuan daerahnya.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

B. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah ini menjadi otonom karena pemerintah pusat melakukan desentralisasi teritorial terhadapnya. Daerah tersebut memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangganya (kepentingannya sendiri) yang diperbolehkan dengan undang-undang tanpa mendapat campur tangan langsung dari pemerintah pusat. Di sini posisi pemerintah pusat hanya mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan agar penyelenggaraan otonominya tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Menurut Charles Eisenmann yang dikutip Nurcholis (2005: 23), menjelaskan bahwa otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan. Sedangkan Nurcholis sendiri berpendapat bahwa istilah otonomi adalah hak yang diberikan kepada penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan

tetap menghormati perundangan yang berlaku. Dengan demikian, otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan tetap menghormati peraturan perundangan yang berlaku.

Pemberian otonomi luas kepada daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai prinsip nyata dan bertanggungjawab, yaitu:

1. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban

yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

2. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standard, arahan, bimbingan, pelatihan, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan

dengan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan pada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004, ada tiga asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:
 - a. Asas kepastian hukum
 - b. Asas tertib penyelenggara
 - c. Asas kepentingan umum
 - d. Asas keterbukaan
 - e. Asas proporsionalitas
 - f. Asas profesionalitas
 - g. Asas akuntabilitas
 - h. Asas efisiensi
 - i. Asas efektivitas
2. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantu, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

E. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dimaksud dengan pendapatan adalah:

Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Secara umum pendapatan daerah dapat diartikan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pendapatan daerah berbeda dengan penerimaan

daerah. Penerimaan daerah adalah semua jenis penerimaan kas yang masuk ke rekening kas daerah baik yang murni berasal dari pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penyelenggaraan tugas pemerintah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merubah secara mendasar model pembiayaan pemerintah daerah. Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut Undang-Undang tersebut, adalah penyerahan kewenangan pemerintahan kepada daerah baik menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan harus diikuti biaya, perangkat, dan tenaga yang memadai, agar daerah mampu menyelenggarakan semua kewenangan yang diserahkan tersebut.

Dengan model penganggaran seperti itu maka pemerintah pusat tak lagi menentukan secara subyektif dana tersebut, tapi mengalokasikan dana secara proporsional dan rasional kepada daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonominya secara kreatif dan bertanggungjawab. Melalui struktur pendanaan demikian, diharapkan pemerintah daerah makin mampu memberikan pelayanan prima kepada publik yang berujung pada penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
2. Penerimaan pinjaman daerah.
3. Dana cadangan daerah.
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber keuangan daerah yang utama adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat, sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang No.33 Tahun 2004, sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Menurut Davey yang dikutip oleh Nurcholis (2005: 98) pajak daerah dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

Sedangkan menurut UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pajak daerah adalah

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah ini terdiri dari:

1) Pajak daerah yang dipungut provinsi

Terbagi atas:

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

2) Pajak daerah yang dipungut Kabupaten/Kota

Terbagi atas:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- g) Pajak parkir

b. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 retribusi adalah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Yang termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah:

- 1) Yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - a) Retribusi jasa umum
 - b) Retribusi jasa usaha
 - c) Retribusi perizinan
- 2) Yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah: retribusi selain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum (Darise 2006: 72) adalah:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- 6) Retribusi pelayanan pasar.
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- 9) Retribusi penggantian biaya cetak peta.
- 10) Retribusi pengujian kapal perikanan.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jenis-jenis retribusi jasa usaha (Darise 2006: 74) adalah:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
- 3) Retribusi tempat pelelangan.
- 4) Retribusi terminal.

- 5) Retribusi tempat khusus parkir.
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- 7) Retribusi penyedotan kakus.
- 8) Retribusi rumah potong hewan.
- 9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
- 10) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
- 11) Retribusi penyebrangan di atas air.
- 12) Retribusi pengolahan limbah cair.
- 13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu (Darise 2006: 76) adalah:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan.
 - 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
 - 3) Retribusi izin gangguan.
 - 4) Retribusi izin trayek.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/
BUMD.
 - 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/
BUMN.
 - 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- Pendapatan Asli Daerah lain yang sah meliputi:
- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - 2) Jasa giro
 - 3) Pendapatan bunga
 - 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
 - 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil dari sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudantugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

3. Lain-lain pendapatan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain adalah hibah atau penerimaan dari propinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Keuangan Daerah

Keuangan pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai: "semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku" (Halim 2004: 18-20).

Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan meningkatkan kekayaan daerah.

Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Dalam Perimbangan keuangan pusat dan daerah ada dua asas yang menjadi landasan, yaitu asas motivasi dan asas efisiensi. Asas motivasi, artinya hal-hal yang berkaitan langsung dengan fungsi pelayanan primer diberikan kepada daerah. Sedangkan asas efisiensi, artinya masyarakat di daerah secara langsung dapat merasakan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atas pengalokasian sumber daya ekonomi setempat. Adapun sumber-sumber dana perimbangan meliputi: hasil eksploitasi sumber daya alam, bagi hasil pajak, pajak tambahan, fasilitas pajak dan pinjaman daerah. Perhitungan perimbangan keuangan pusat dan daerah ditetapkan berdasarkan empat variabel: Penduduk (jumlah, komposisi, umur, tingkat pendidikan), wilayah (luas, panjang jalan, panjang jembatan, sungai, pulau), ekonomi (PDRB, tingkat inflansi, tingkat pengangguran), dan PAD (hasil pajak, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan hasil-hasil sah lainnya). Variabel ini digunakan untuk memformulasikan masalah penerimaan keuangan daerah dalam hubungannya dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dari segi teori perencanaan secara umum (Adirinekso 1999: 123-124).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antara propinsi dan kabupaten/ kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah. Sehingga untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah. Menurut Halim (2004: 27), kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan memperhitungkan parameter-parameter berikut:

1. Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD).
2. Persentase PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap TPD.
3. Persentase PAD terhadap Pengeluaran Rutin.
4. Persentase PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengeluaran Rutin.

G. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki (The Liang Gie 1997: 108).

Efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi, efektivitas merupakan kaitan atau hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapainya.

Efektivitas dalam pemerintah daerah dapat diartikan sebagai penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan di dalam batas anggaran yang tersedia, dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti apa yang telah direncanakan. Namun demikian, walaupun ada yang dilaksanakan menyimpang dari rencana semula, tetapi mempunyai dampak yang menguntungkan pada kelompok penerima sasaran manfaat, maka dapat dikatakan efektif.

H. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard yang dikutip oleh Halim (2004: 188) ada empat macam pola hubungan yang memperkenalkan "Hubungan Situasional" yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

1. Pola Hubungan Instruktif, kemampuan keuangan daerah rendah sekali dan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah

daerah. Pada pola hubungan instruktif ini, daerah dianggap belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

2. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-24,99%	Instruktif
Rendah	25%-49,99%	Konsultatif
Sedang	50%-74,99%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim (2004: 189)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus. Studi kasus berfokus pada analisis kontekstual dan interaksi atau hubungan antara peristiwa dan kondisi subjek atau objek penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan Juli-Agustus Tahun 2007.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

2. Obyek Penelitian

Objek yang diteliti adalah data Pendapatan Asli Daerah dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Bengkayang yang berasal dari tahun anggaran 2003-2005.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh penulis dari wawancara dengan staf BPKD dan pejabat setempat yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh penulis dari hasil dokumentasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

E. Data yang dicari

Data yang diperlukan atau data yang akan dicari dalam penelitian ini adalah:

1. Gambaran umum Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2003-2005.
3. Data Realisasi Penerimaan Daerah tahun anggaran 2003-2005.
4. Data Realisasi Pengeluaran Rutin Daerah tahun anggaran 2003-2005.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan memperoleh informasi secara langsung dari bagian-bagian yang berwenang atau sumber yang bersangkutan yaitu bagian-bagian keuangan Pemerintah Daerah dan Pejabat Daerah setempat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip data dari BPKD setempat.

G. Teknik Analisis Data

1. Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) di Kabupaten Bengkayang adalah dengan menghitung kontribusi PAD. Kontribusi dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Langkah-langkah yang akan digunakan dalam menghitung rasio kontribusi adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data mengenai realisasi PAD dan realisasi TPD yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.
- b. Melakukan penghitungan rasio kontribusi dengan cara membandingkan realisasi pemungutan PAD dengan realisasi TPD dikalikan 100%.
- c. Melakukan analisis terhadap hasil penghitungan rasio kontribusi.

Tabel yang akan digunakan untuk melihat kontribusi PAD adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Contoh Tabel Analisis Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah

Tahun Anggaran (a)	Realisasi PAD (b)	Penerimaan Daerah (c)	Kontribusi (%) (b/c)
Rata-Rata			

Sumber: Data diolah

- Untuk mengetahui apakah penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah sudah efektif digunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Efektivitas dihitung dengan membandingkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%, sehingga apabila rasio efektivitas semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Langkah-langkah yang akan digunakan dalam menghitung seberapa besar efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data mengenai realisasi PAD dan target PAD yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.
 - b. Melakukan penghitungan rasio efektivitas dengan cara membandingkan realisasi PAD terhadap target PAD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.
 - c. Melakukan analisis terhadap hasil penghitungan rasio efektivitas.
3. Untuk menjawab permasalahan ke dua digunakan analisis kemampuan pendapatan asli daerah dengan membandingkan parameter-parameter berikut:

a. Persentase PAD terhadap total penerimaan daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Langkah-langkah yang akan digunakan dalam menghitung seberapa besar persentase PAD terhadap total penerimaan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data mengenai realisasi PAD dan TPD yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.
- 2) Melakukan penghitungan dengan cara membandingkan realisasi PAD terhadap TPD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.
- 3) Melakukan analisis terhadap hasil penghitungan persentase PAD terhadap TPD.

Jika dari perhitungan diketahui bahwa:

- 1) Tingkat kemandirian PAD terhadap TPD antara 0% - 24,99% berarti kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang rendah sekali, maka Kabupaten Bengkayang sangat tergantung kepada pemerintah pusat yang berarti potensi ekonomi daerah Kabupaten Bengkayang belum mampu mencukupi kebutuhan daerahnya dalam melaksanakan otonomi daerah.
- 2) Tingkat kemandirian PAD terhadap TPD antara 25% - 49,99% berarti kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang rendah, namun campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dengan demikian potensi ekonomi daerah Kabupaten Bengkayang dianggap sedikit mampu mencukupi kebutuhan daerahnya dalam melaksanakan otonomi.
- 3) Apabila tingkat kemandirian PAD terhadap TPD antara 50% - 74,99% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang, dengan demikian potensi ekonomi daerah yang bersangkutan mendekati mampu mencukupi kebutuhan daerahnya dalam melaksanakan otonomi daerah.
- 4) Apabila tingkat kemandirian PAD terhadap TPD antara 75% - 100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi, maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena benar-benar mampu dan mandiri untuk mencukupi kebutuhan daerahnya dalam melaksanakan otonomi daerahnya.

b. Persentase PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap TPD

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Dana Bagi Hasil}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Selain menghitung persentase PAD terhadap TPD, dana bagi hasil juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Langkah-langkah yang akan digunakan dalam menghitung seberapa besar persentase PAD dan dana bagi hasil terhadap total penerimaan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data mengenai realisasi PAD, bagi hasil dan TPD yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.
- 2) Melakukan penghitungan dengan cara membandingkan realisasi PAD dan dana bagi hasil terhadap TPD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.
- 3) Melakukan analisis terhadap hasil penghitungan persentase PAD dan dana bagi hasil terhadap TPD.

c. Persentase PAD terhadap pengeluaran rutin

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pengeluaran Rutin (PR)}} \times 100\%$$

Menurut Abdul Halim, kebijakan anggaran pada dasarnya selalu diusahakan agar pendapatan asli daerah terutama yang bersumber dari PAD dapat membiayai pengeluaran rutin daerah (Halim 2001: 32).

Sehingga hasil dari perhitungan ini diharapkan PAD dapat membiayai pengeluaran rutin.

Langkah-langkah yang akan digunakan dalam menghitung seberapa besar persentase PAD terhadap pengeluaran rutin adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data mengenai realisasi PAD dan pengeluaran rutin yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.
- 2) Melakukan penghitungan dengan cara membandingkan realisasi PAD terhadap pengeluaran rutin Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.
- 3) Melakukan analisis terhadap hasil penghitungan persentase PAD terhadap pengeluaran rutin..

d. Persentase PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengeluaran Rutin

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} + \text{Bagi Hasil}}{\text{Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

Langkah-langkah yang akan digunakan dalam menghitung seberapa besar persentase PAD terhadap pengeluaran rutin adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data mengenai realisasi PAD, dana bagi hasil dan pengeluaran rutin yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.

- 2) Melakukan penghitungan dengan cara membandingkan realisasi PAD dan dana bagi hasil terhadap pengeluaran rutin Kabupaten Bengkayang tahun bagi hasil anggaran 2003-2005.
- 3) Melakukan analisis terhadap hasil penghitungan persentase PAD dan dana bagi hasil terhadap pengeluaran rutin..

Dana bagi hasil dalam perhitungan ini diharapkan mampu meningkatkan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin, sehingga Kabupaten Bengkayang dinyatakan mampu dalam membiayai segala urusan daerahnya.

Keterangan :

PAD = pendapatan asli daerah

TPD = total penerimaan daerah

PR = pengeluaran rutin

Setelah menghitung parameter-parameter di atas, langkah selanjutnya adalah menghitung tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan rumus :

$$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Jika dari perhitungan ini diketahui bahwa sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat hasilnya kecil, maka tingkat ketergantungan Kab. Bengkayang terhadap pemerintah pusat semakin rendah.

4. Untuk menjawab permasalahan ke tiga digunakan Angka Indeks Berantai. Angka Indeks Berantai adalah angka indeks yang menggunakan tahun dasar atau periode sebelumnya. Angka Indeks Berantai menunjukkan

perubahan dari satu periode ke periode yang lain. Angka Indeks Berantai dinyatakan dengan rumus (Boedijoewono 2001: 194) yaitu:

$$Q_{0,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_0} \times 100\%$$

Dimana:

$Q_{0,n}$ = Angka Indeks Berantai tahun n dengan tahun dasar 0

\sum = Jumlah

Q_0 = Kuantita tahun sebelumnya

Q_n = Kuantita tahun yang akan dihitung

Tabel 3 Contoh Tabel Realisasi dan Pertumbuhan PAD dengan Angka Indeks

Tahun Anggaran	Realisasi PAD	Pertumbuhan PAD(%)
Rata-Rata		

Sumber: Data diolah

Langkah-langkah yang akan digunakan dalam menghitung pertumbuhan PAD adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data mengenai realisasi PAD yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.
- 2) Melakukan penghitungan dengan cara membandingkan realisasi PAD tahun anggaran terhadap realisasi PAD tahun sebelumnya Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.
- 3) Melakukan analisis terhadap hasil penghitungan angka indeks.

Jika hasil perhitungan Angka Indeks diketahui bahwa perkembangan PAD mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka daerah tersebut dinyatakan mampu mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

A. Geografi

1. Letak Geografi

Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara propinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, Kabupaten Bengkayang terletak di 0° 33' 00" Lintang Utara sampai 1° 30' 00" Lintang Utara dan 108° 39' 00" Bujur Timur sampai 110° 10' 00" Bujur Timur.

Secara administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- a. Utara : Serawak-Malaysia Timur dan Kabupaten Sambas
- b. Selatan : Kabupaten Pontianak
- c. Barat : Laut Natuna dan Kota Singkawang
- d. Timur : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Landak

2. Topografi dan Sungai

Ada dua kondisi alam yang membedakan wilayah Kabupaten Bengkayang. Kondisi alam yang pertama adalah pesisir pantai. Keseluruhan wilayah pesisir ini termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Sungai Raya. Kondisi alam yang kedua adalah daratan dan perbukitan yang terdiri dari Kecamatan Capkala, Samalantan, Monterado,

Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Ledo, Suti Semarang, Lumar, Sanggau Ledo, Seluas, Jagoi Babang, dan Siding.

Ada tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang melintasi wilayah Kabupaten Bengkayang, yaitu: DAS Sambas, DAS Sungai Raya, dan DAS Sungai Duri. Dari ketiga DAS tersebut, yang paling besar adalah DAS Sambas yang luasnya meliputi 722.500 hektar sedangkan DAS Sungai Raya sebesar 50.000 hektar dan DAS Sungai Duri hanya sebesar 24.375 hektar.

3. Luas Wilayah

Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 5.396,30 km² atau sekitar 3,68% dari total luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten dengan cakupan wilayah terkecil di Kalimantan Barat.

Daerah Pemerintahan Kabupaten Bengkayang dibagi menjadi 14 kecamatan. Dari sejumlah kecamatan yang ada, Kabupaten Bengkayang dibagi lagi menjadi 2 kelurahan dan 117 desa definitif. Seiring dengan adanya otonomi daerah yang menuntut pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang lebih baik, di masa yang akan datang, direncanakan Kabupaten Bengkayang akan memekarkan lagi wilayah pemerintahannya.

Dilihat dari luas masing-masing kecamatan, Jagoi Babang merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Bengkayang dengan cakupan wilayah sebesar 655 km² atau sekitar 12,4% dari luas Kabupaten Bengkayang keseluruhan dan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah

Kecamatan Capkala dengan luas wilayah sebesar 46,35 km² atau hanya sekitar 0,86% dari total luas Kabupaten Bengkayang.

4. Jenis Tanah

Dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Bengkayang adalah jenis tanah paldosit merah kuning, yaitu sebesar 322.347 hektar dan yang paling sedikit adalah jenis OGH, yaitu sebesar 6.700 hektar.

Dilihat dari persebaran lerengnya, sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkayang masuk pada kelas lereng 15-40% dan hanya sebagian kecil yang masuk dalam kelas lereng lebih dari 40%. Selanjutnya, dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar masuk dalam tekstur sedang, yaitu sebesar 343.023 hektar. Luas wilayah tergenang di Kabupaten Bengkayang hanya sebesar 36.020 hektar dan luas wilayah yang tidak tergenang adalah sebesar 503.610 hektar.

5. Pulau-pulau

Walaupun hanya sebagian kecil wilayah Kabupaten Bengkayang yang merupakan wilayah perairan laut, Kabupaten Bengkayang juga memiliki sejumlah pulau, yaitu sebesar 12 pulau. Dari sejumlah pulau tersebut, ada sebanyak 5 pulau masih belum berpenghuni dan 7 pulau sudah berpenghuni. Semua pulau yang ada terletak di wilayah perairan laut Natuna. Pulau terbesar yang berpenghuni adalah Pulau Lemukutan dan Pulau Penatah Besar.

B. Pemerintahan

1. Sejarah Kabupaten Bengkayang

Kabupaten Bengkayang pada masa penjajahan Belanda merupakan bagian dari wilayah *Afdeling Van Singkawang*. Pada waktu itu, dilakukan pembagian wilayah *Afdeling* administrasi yang daerah hukumnya meliputi:

- a. *Onder Afdeling* Singkawang, Bengkayang, Pemangkat, dan Sambas (daerah Kesultanan Sambas).
- b. Daerah Kerajaan/Penembahan Mempawah
- c. Daerah Kerajaan Pontianak yang sebagian daerahnya adalah Mandor.

Setelah Perang Dunia II berakhir, daerah tersebut dibagi menjadi daerah otonom Kabupaten Sambas yang beribukota di Singkawang.

Kabupaten Sambas ini membawahi 4 (empat) kawedanan, yaitu :

- a. Kawedanan Singkawang
- b. Kawedanan Pemangkat
- c. Kawedanan Sambas
- d. Kawedanan Bengkayang

Pada masa pemerintahan RI, menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 mengenai Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (LNRI Nomor 72 Tahun 1959, tambahan LNRI Nomor 1980), terbentuklah Kabupaten Sambas. Wilayah pemerintahan Kabupaten Sambas ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang sekarang.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang, secara resmi mulai tanggal 20 April 1999, Kabupaten Bengkayang terpisah dari Kabupaten Sambas. Selanjutnya, pada tanggal 27 April 1999, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengangkat Bupati Bengkayang yang pertama yang dijabat oleh Drs. Jacobus Luna. Pada waktu itu, wilayah Kabupaten Bengkayang ini meliputi 10 Kecamatan. Selanjutnya, dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada tahun 2005, terpilih kembali Drs. Jacobus Luna dan Suryatman Gidot, SPd sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang untuk periode 2005-2010.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Kota Singkawang mengakibatkan Kabupaten Bengkayang dimekarkan kembali dengan melepas 3 Kecamatan yang masuk ke dalam wilayah pemerintahan kota Singkawang sehingga tinggal menjadi 7 Kecamatan. Kabupaten Bengkayang kembali bertambah menjadi 10 Kecamatan dengan pembentukan 3 Kecamatan baru, yaitu: Kecamatan Monterado, Kecamatan Teriak, dan Kecamatan Suti Semarang. Pada awal tahun 2004, dari 10 Kecamatan yang ada tersebut, Kabupaten Bengkayang dimekarkan lagi menjadi 14 Kecamatan dengan 4 Kecamatan barunya, yaitu: Kecamatan Capkala, Kecamatan Sungai Betung, Kecamatan Lumar, dan Kecamatan Siding.

2. DPRD

Berdasarkan hasil Pemilu tahun 2005, jumlah kursi yang diperebutkan untuk DPRD adalah sebanyak 25 kursi dan banyaknya kontestan Pemilu yang ada sebanyak 24 partai politik. Pada tahun 2005, jumlah anggota legislatif di Kabupaten Bengkayang ada sebanyak 25 orang yang terbagi dalam 3 fraksi, yaitu Fraksi Golkar sebanyak 5 orang, Fraksi PDIP sebanyak 5 orang, dan Fraksi Bersatu sebanyak 15 orang.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebagian besar anggota legislatif merupakan tamatan SLTA dan dilihat menurut jenis kelamin, hanya ada satu orang anggota legislatif perempuan. Adapun produk yang dikeluarkan oleh DPRD Bengkayang selama tahun 2005 adalah sebanyak 27 produk, yaitu 18 SK pimpinan dan 9 keputusan DPRD.

3. Pemerintahan Desa

Sampai dengan akhir tahun 2005, Kabupaten Bengkayang membawahi 14 Kecamatan, 2 Kelurahan, 117 desa, dan 265 dusun. Dari sejumlah desa dan dusun yang ada, masih banyak terdapat desa dan dusun terpencil di Kabupaten Bengkayang, yaitu sebanyak 83 desa terpencil dan 84 dusun terpencil.

Jika dilihat menurut tingkat pendidikan dari kepala pemerintahan di tingkat desa beserta pemuka masyarakat yang ada (sekretaris desa, kaur desa, dan kepala dusun), maka sebagian besar kepala desa dan pemuka masyarakat yang ada tingkat pendidikannya masih relatif rendah. Diharapkan di masa yang akan datang, aparat pemerintah sampai tingkat

desa semakin berkualitas sehingga fokus pembangunan yang dilaksanakan semakin terarah.

4. Pegawai Negeri

Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sampai dengan tahun 2005 adalah sebanyak 3.784 orang. Terjadi peningkatan jumlah pegawai karena adanya penerimaan pegawai baru yang dilaksanakan pada tahun 2005.

Dilihat menurut golongannya, sebagian besar pegawai Kabupaten Bengkayang adalah golongan III dan golongan II dengan jumlah pegawai golongan III sebanyak 1.822 orang dan jumlah pegawai golongan II sebanyak 1.719 orang. Selanjutnya, dilihat menurut eselon yang ada, sebagian besar pegawai tersebut masuk dalam golongan non eselon, yaitu sebanyak 3.553 orang pegawai. Jumlah pegawai yang masuk dalam eselon II adalah sebanyak 16 orang, eselon III sebanyak 64 orang dan eselon IV sebanyak 151 orang.

C. Penduduk dan Ketenagakerjaan

1. Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi BPS Kabupaten Bengkayang, jumlah penduduk Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 adalah sebesar 205.877 jiwa yang tersebar di 14 Kecamatan. Dilihat menurut jenis kelaminnya jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 106.104 jiwa, sedangkan penduduk perempuan adalah sebanyak 99.774 jiwa.

Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung rasio jenis kelamin Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 adalah 106. Angka ini berarti jika 106 penduduk laki-laki maka ada 100 penduduk perempuan.

Jika jumlah penduduk dirinci menurut Kecamatan, maka jumlah penduduk yang paling besar berada di Kecamatan Sungai Raya. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Suti Semarang. Namun demikian, dilihat dari kepadatan penduduknya, Kecamatan Capkala memiliki tingkat kepadatan paling tinggi, yaitu sebesar 156 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Siding memiliki tingkat kepadatan paling rendah, yaitu sebesar 10 jiwa kilometer persegi.

Penduduk Kabupaten Bengkayang termasuk dalam kelompok usia muda. Hal ini terlihat dari masih banyaknya penduduk yang masuk dalam kelompok usia muda (di bawah 20 tahun), yaitu sebesar 48,76%. Dari pembagian penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat kita peroleh rasio beban ketergantungannya (*dependency ratio*). Rasio beban ketergantungan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 adalah sebesar 67,77. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sekitar 68 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 adalah sebanyak 43.577 rumah tangga. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada maka dapat diperoleh rata-rata jumlah anggota rumah

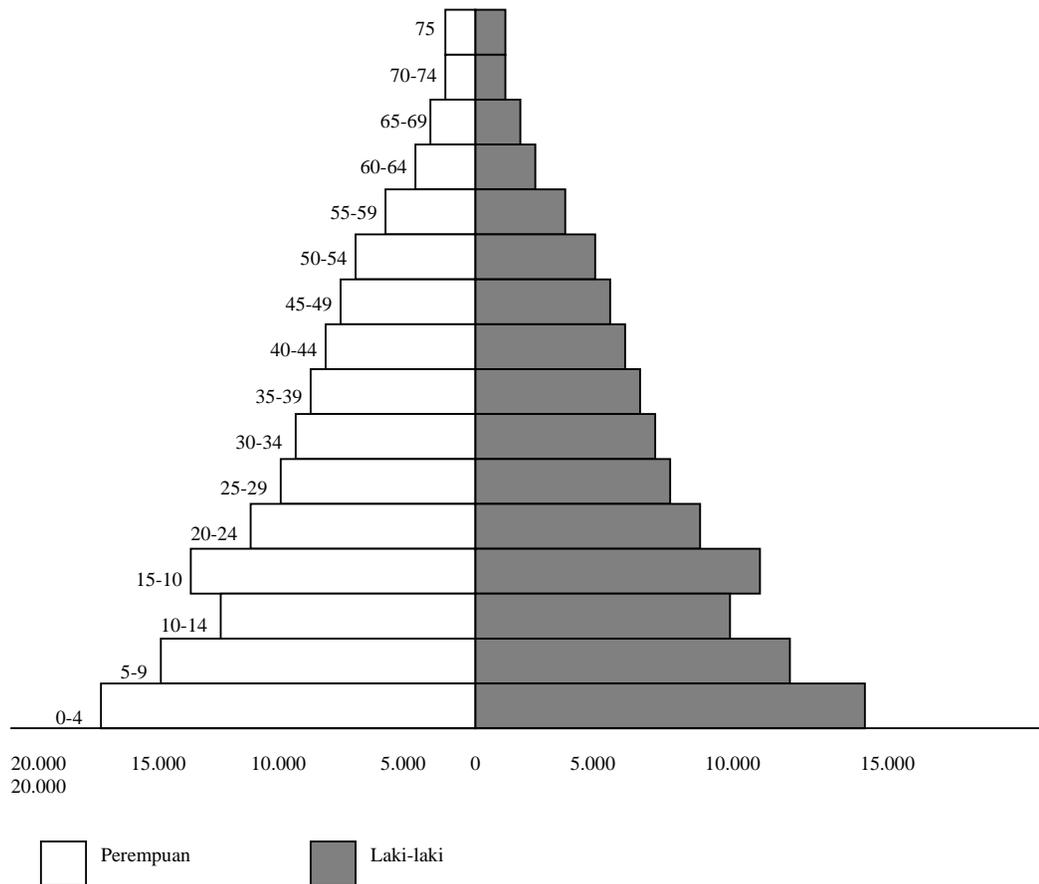
tangga. Pada tahun 2005, rata-rata jumlah anggota rumah tangga adalah sebanyak 5 jiwa per rumah tangga.

**Tabel 4 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kecamatan
Tahun 2001-2005**

No.	Kecamatan	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sungai Raya	36.542	37.485	38.452	39.440	40.453
2.	Capkala	6.447	6.629	6.818	7.013	7.216
3.	Samalantan	18.069	18.673	19.298	19.943	20.610
4.	Monterado	21.609	22.262	22.936	23.630	24.347
5.	Bengkayang	15.804	16.354	16.916	17.502	18.109
6.	Teriak	10.436	10.771	11.119	11.480	11.845
7.	Sungai Betung	7.698	7.936	8.188	8.445	8.709
8.	Ledo	12.131	12.561	13.004	13.461	13.936
9.	Suti Semarang	4.088	4.244	4.402	4.565	4.739
10.	Lumar	5.029	5.204	5.395	5.589	5.789
11.	Sanggau Ledo	19.709	20.275	20.868	21.468	22.091
12.	Seluas	12.211	12.647	13.096	13.560	14.043
13.	Jagoi Babang	7.519	7.755	7.995	8.240	8.500
14.	Siding	4.858	5.010	5.166	5.323	5.490
Jumlah		182.150	187.806	193.653	199.659	205.877

Sumber : BPS Kabupaten Bengkayang

Keterangan : Hasil Proyeksi Penduduk



Grafik I
Piramida Penduduk
Kabupaten Bengkulu Tahun 2005
Sumber : BPS Kabupaten Bengkulu

2. Ketenagakerjaan

Secara garis besar, penduduk dalam hubungannya dengan kegiatan ekonomi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Penduduk usia di bawah 10 tahun
- b. Penduduk usia 10 tahun ke atas

Penduduk yang berusia 10 tahun ke atas digolongkan lagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Angkatan kerja, yaitu yang bekerja dan mencari kerja
- b. Bukan angkatan kerja, yaitu yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil Susenas 2005, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang masuk dalam angkatan kerja sebesar 61,28%, sedangkan yang tidak masuk angkatan kerja adalah sebesar 38,72%. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 55,11%, mencari kerja sebesar 6,17%, sedang sekolah sebesar 21,23%, mengurus rumah tangga sebesar 13,25%, dan kegiatan lainnya sebesar 4,24%.

Dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas, yang bekerja menurut lapangan usaha, sebagian besar penduduk Kabupaten Bengkayang bekerja di sektor pertanian dan perdagangan, yaitu masing-masing sebesar 72,93% dan 7,86%. Selanjutnya, dilihat dari status pekerjaan, sebagian besar penduduk Kabupaten Bengkayang yang berusia 10 tahun ke atas yang bekerja adalah berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak dibayar, dan pekerja tidak dibayar. Dilihat dari jumlah jam kerja, sebagian besar penduduk yang bekerja memiliki jumlah jam kerja rata-rata sebesar 35-49 jam.

Jumlah pencari kerja yang tercatat di Kantor Tenaga Kerja selama tahun 2005 adalah sebanyak 2.236 orang. Dilihat menurut jenis kelamin,

1.056 orang pencari kerja laki-laki dan 1.180 orang pencari kerja perempuan.

D. Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu masalah penting yang menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada suatu bangsa. Apabila tingkat pendidikan semakin tinggi maka kualitas SDM yang ada juga akan semakin bagus.

Perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di Kabupaten Bengkayang cukup menggembirakan. Hal ini tidak lepas dari peran serta semua pihak baik institusi pemerintah maupun swasta. Peran serta tersebut dapat dilihat dalam hal penyediaan sarana fisik maupun non fisik yang ada.

Pada tahun 2005, terdapat 17 TK, 223 SD, 5 MI, 36 SLTP, 3 MTs, 13 SLTA, 2 Aliyah dan 2 SMK di Kabupaten Bengkayang. Mulai tahun 2005 di Kabupaten Bengkayang, baru terdapat 1 TK Negeri yang terletak di Ibukota Kabupaten. Sejumlah TK yang ada menampung 564 siswa dan 47 tenaga pengajar. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa rasio guru dan murid untuk tingkat pendidikan TK pada tahun 2005 adalah sebesar 12. Artinya bahwa satu orang guru masih harus mengawasi 12

siswa. Rasio murid dan guru TK ini dapat menggambarkan ketersediaan tenaga pengajar terhadap sejumlah murid tertentu. Jika rasio murid terhadap guru kecil atau jumlah murid yang diawasi oleh seorang guru sedikit, maka diharapkan dapat berakibat baik terhadap murid yang ada karena perkembangan siswa akan lebih diperhatikan.

Jumlah gedung sekolah SD yang ada di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 sebanyak 223 bangunan (220 SD negeri dan 3 SD swasta), jumlah gedung MI sebanyak 5 bangunan (semuanya swasta), gedung SLTP sebanyak 36 bangunan (21 SLTP negeri dan 15 SLTP swasta), dan gedung MTs sebanyak 3 bangunan (semuanya swasta). Jumlah murid SD di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 adalah sebesar 31.763 siswa dengan jumlah guru sebesar 1.316 orang. Sedangkan jumlah murid MI sebesar 483 siswa dengan jumlah guru sebesar 39 orang. Untuk tingkat lanjutan pertama, terdapat 7.967 siswa SLTP dengan 523 orang gurunya dan 386 siswa MTs dengan 40 orang gurunya.

Berdasarkan data yang ada, rasio murid dan guru SD/ sederajat adalah sebesar 24. Rasio murid dan guru SD negeri maupun swasta adalah sama, yaitu sebesar 23. Sedangkan rasio murid dan guru MI yang semuanya swasta adalah sebesar 12. Pada tingkat SLTP/ sederajat, rasio murid dan guru untuk SLTP swasta sebesar 1, sedangkan rasio murid dan guru MTs swasta sebesar 10. Hal ini berarti bahwa ketersediaan guru terhadap murid yang ada cukup memadai untuk tingkat SD maupun SLTP.

Jenjang pendidikan SLTA dibedakan antara SLTA umum dan kejuruan. Jumlah gedung SLTA umum pada tahun 2005 adalah sebanyak 13 bangunan, yaitu 7 SLTA negeri dan 6 SLTA swasta. Selanjutnya, terdapat 2 SMK yaitu 1 negeri dan 1 swasta dan 1 Aliyah swasta. Dilihat dari ruang kelasnya, terdapat 78 ruang kelas untuk SLTA umum, 10 ruang kelas untuk SMK dan 3 ruang kelas untuk MA. Jumlah murid dan guru SLTA umum pada tahun 2005 adalah sebesar 3.251 siswa dan 244 guru. Selanjutnya, terdapat 534 siswa dan 51 orang guru untuk SMK dan serta 120 siswa dan 22 guru untuk MA. Dengan demikian, diketahui bahwa rasio murid dan guru untuk tingkat SLTA/ sederajat secara umum adalah sebesar 13. Untuk tingkat SLTA umum negeri, rasio murid dan guru yang ada sebesar 14 dan untuk SLTA umum swasta sebesar 13, sedangkan rasio murid dan guru untuk SMK negeri adalah sebesar 10 dan SMK swasta adalah sebesar 11. Untuk MA swasta, rasio murid dan gurunya hanya sebesar 5.

Tabel 5 Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Jenis Sekolah Tahun 2005

Jenis Sekolah	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)
1. TK Negeri/Swasta	17	47	564
2. SD Negeri/Swasta	223	1.316	31.763
3. MI Negeri/Swasta	5	39	483
4. SLTP Negeri/Swasta	36	523	7.967
5. MTs Negeri/Swasta	3	40	386
6. SLTA Negeri/Swasta	13	244	3.251
7. Aliyah Negeri/Swasta	2	22	120
8. SMK Negeri/Swasta	2	51	534

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Apabila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka kesejahteraan rakyat juga akan meningkat secara langsung. Selain itu, pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan. Hal ini dapat diwujudkan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti: rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan, dan ketersediaan dokter.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan tahun 2005, diketahui terjadi peningkatan jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Bengkayang. Tenaga kesehatan yang jumlahnya paling banyak adalah perawat (133 orang) dan bidan (83 orang). Jumlah sarana kesehatan yang tersedia pada tahun 2005 adalah: rumah sakit umum sebanyak 2 unit, puskesmas sebanyak 59 unit, puskesmas keliling 12 unit, polindes 87 unit, balai pengobatan 2 unit dan posyandu sebanyak 241 unit.

Dilihat distribusi tenaga kesehatan per kecamatan, jumlah tenaga kesehatan paling banyak terdapat di Kecamatan Sungai Raya, yaitu 2 dokter umum, 2 dokter gigi, 15 bidan, 24 perawat. Selain itu, Kecamatan Bengkayang juga memiliki tenaga kesehatan yang cukup memadai, yaitu 2 dokter umum, 1 dokter gigi dan 9 bidan, dan 7 perawat. Di samping itu, terdapat juga tenaga kader yang tersebar di desa-desa sebanyak 1.055 orang yang biasanya membantu dalam kegiatan pelayanan kesehatan di

posyandu. Dilihat dari banyaknya sarana penyediaan obat-obatan, di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005, terdapat 1 apotik (di luar apotik rumah sakit) dan 15 toko obat yang hanya berada di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sanggau Ledo, dan Kecamatan Bengkayang. Pada masa yang akan datang, pemerintah diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan penyediaan berbagai sarana kesehatan, khususnya dalam hal penyediaan obat.

Program Keluarga Berencana merupakan suatu usaha langsung yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kelahiran. Hal ini terutama dilakukan melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Di samping itu, program KB juga bertujuan untuk membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Target akseptor KB baru dan KB aktif pada tahun 2005 (berdasarkan data tahun 2004) adalah sebanyak 7.713 orang dan 28.481 orang. Akan tetapi, realisasi pencapaian akseptor KB baru hanya sebanyak 4.937 orang (atau sebesar 64% dari target) dan sebanyak 21.609 orang (atau sebesar 76% dari target) untuk akseptor KB aktif.

Dilihat dari banyaknya keluarga sejahtera, diketahui bahwa pada tahun 2005 (berdasarkan data tahun 2004) di Kabupaten Bengkayang terdapat 2.678 keluarga yang masuk dalam kategori pra sejahtera, 8.637 keluarga masuk dalam kategori sejahtera I, 16.219 keluarga masuk dalam kategori sejahtera II, 3.462 keluarga masuk dalam kategori sejahtera III, dan 929 keluarga masuk dalam kategori sejahtera III plus. Kecamatan

Bengkayang tercatat sebagai kecamatan yang mempunyai keluarga pra sejahtera paling banyak, yaitu sebanyak 641 keluarga dan Kecamatan Jagoi Babang yang memiliki jumlah keluarga pra sejahtera paling kecil, yaitu sebanyak 37 keluarga.

3. Agama

Salah satu butir penting yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 adalah negara menjamin kehidupan beragama dan senantiasa mengembangkan kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan.

Tercatat pada tahun 2005, pemeluk agama Islam sebanyak 71.734 orang, Kristen Katolik sebanyak 63.675 orang, Kristen Protestan sebanyak 52.840 orang, Hindu sebanyak 347 orang, Budha sebanyak 16.731 orang dan lainnya sebanyak 550 orang. Sarana dan prasarana ibadah yang ada pada tahun 2005 tercatat masjid sebanyak 153 unit, surau sebanyak 119 unit, gereja Katolik 118 unit, gereja Protestan sebanyak 282 unit, pura sebanyak 2 unit, Vihara sebanyak 3 unit, dan klenteng sebanyak 30 unit yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkayang.

Banyaknya quota haji dan haji yang diberangkatkan dari Kabupaten Bengkayang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, banyaknya quota haji di Kabupaten Bengkayang adalah sebanyak 40 orang dan 39 orang yang mendaftar diberangkatkan ke tanah suci.

4. Kriminalitas

Statistik kriminalitas sangat diperlukan. Hal ini digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat keamanan dan kerawanan sosial suatu daerah. Pada tahun 2005, banyaknya tahanan yang masuk dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bengkayang adalah sebanyak 35 kasus. Seluruh tahanan yang ada dan diselesaikan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Singkawang.

5. Lansia dan Anak Terlantar

Di Bengkayang, jumlah lansia pada tahun 2005 adalah sebanyak 15.354 orang dan anak terlantar sebanyak 46.146 orang. Tingginya jumlah lansia di Kabupayen Bengkayang menunjukkan tingkat kesehatan yang semakin baik. Akan tetapi, hal ini menjadi masalah karena masyarakat yang ada belum berpikir bahwa lansia yang ada perlu ditampung dan masih bisa dikaryakan. Untuk itu, perlu dilakukan penanganan oleh pemerintah dalam hal penyediaan sarana dan prasarana guna menampung para lansia yang ada serta pengadaan program untuk mengkaryakan para lansia yang masih berkemauan untuk bekerja.

Jumlah penderita cacat yang tercatat di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 adalah sebanyak 2.312 orang untuk cacat tubuh, 589 orang untuk tuna rungu, 309 orang untuk tuna grahita, dan 473 orang untuk tuna netra. Selanjutnya, pekerja sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkayang berjumlah 315 orang. Masalah penyandang cacat, anak terlantar, dan lansia merupakan masalah penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai

upaya untuk menangani masalah-masalah tersebut, antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah untuk orang cacat dan panti-panti untuk orang cacat maupun lansia.

E. Pertanian

Sektor pertanian masih menjadi sektor utama penopang perekonomian di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005. Hal ini terbukti karena sektor ini menjadi penyedia lapangan kerja terbesar dan menjadi penyumbang pendapatan terbesar. Untuk itu, pengelolaan di sektor pertanian masih perlu ditingkatkan lagi guna semakin memantapkan sektor ini di dalam perekonomian Kabupaten Bengkayang.

1. Tanaman Pangan

Sektor pertanian khususnya subsektor pertanian tanaman pangan mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Penyediaan subsektor tanaman pangan ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat khususnya dalam hal penyediaan pangan di Kabupaten Bengkayang. Dengan semakin meningkatnya produksi di subsektor ini, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkayang akan semakin baik sehingga nantinya daerah Kabupaten Bengkayang mampu berswasembada pangan.

Pada tahun 2005, luas panen tanaman padi sebesar 22.810 hektar, yaitu luas panen padi sawah sebesar 11.662 hektar dan padi ladang sebesar 11.148 hektar. Produksi padi selama tahun 2005 adalah sebesar 71.702 ton

dan jika dipilah menurut jenisnya, produksi padi sawah sebesar 46.661 ton dan produksi padi ladang sebesar 25.041 ton. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata produksi padi di Kabupaten Bengkayang adalah sebesar 31,43 kwintal per hektar dan jika dilihat menurut jenisnya, padi sawah memiliki rata-rata produksi sebesar 40,01 kwintal per hektar dan padi ladang 22,46 kwintal per hektar.

Jika dilihat per kecamatan maka sentra produksi padi secara umum berada di Kecamatan Sanggau Ledo dengan luas panen sebesar 5.478 hektar dan produksi sebesar 17.222 ton atau dengan kata lain, rata-rata produksinya sebesar 31,44 kwintal per hektar. Dilihat menurut jenis padinya, jenis padi sawah adalah jenis padi yang paling besar produksinya dan berada di Kecamatan Samalantan dengan luas panen sebesar 2.518 hektar dan produksi sebesar 10.536 ton atau dengan kata lain, rata-rata produksinya sebesar 41,84 kwintal per hektar. Untuk jenis tanaman padi ladang, produksi yang terbesar juga berada di Kecamatan Sanggau Ledo dengan luas panen selama tahun 2005 sebesar 4.370 hektar dan produksi sebesar 12.628 ton atau rata-rata produksinya sebesar 28,90 kwintal per hektar.

Luas panen tanaman jagung di Kabupaten Bengkayang selama tahun 2005 sebesar 22.372 hektar dengan produksi sebesar 98.653 ton atau rata-rata produksinya sebesar 44,10 kwintal per hektar dan ini merupakan produksi jagung terbesar se Kalimantan Barat. Dilihat menurut kecamatan, produksi jagung terbesar berada di Kecamatan Sanggau Ledo dengan

produksinya sebesar 89.511 ton dan luas panen sebesar 19.480 hektar atau rata-rata produksinya sebesar 45,95 kwintal per hektar.

Jenis tanaman palawija lainnya yang dihasilkan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 antara lain adalah ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Masing-masing jenis tanaman palawija tersebut memproduksi sebesar 871 ton untuk ubi jalar dengan produksi terbesar di Kecamatan Suti Semarang, sebesar 369 ton untuk kacang tanah dengan produksi terbesar di Kecamatan Lumar, 69 ton untuk kacang kedelai dengan produksi terbesar di Kecamatan Sanggau Ledo dan sebesar 65 ton untuk kacang hijau dengan produksi terbesar di Kecamatan Suti Semarang.

Pada tahun 2005, jenis tanaman sayuran yang paling banyak produksinya adalah tanaman ketimun, yaitu sebesar 412,90 ton, disusul tanaman kacang panjang sebesar 294,65 ton, dan tanaman semangka sebesar 208,70 ton. Dilihat dari hasil per hektarnya, tanaman sayuran yang paling banyak produksinya adalah tanaman semangka, yaitu sebesar 56,41 kwintal per hektar. Sedangkan dilihat dari luas panennya, tanaman sayuran paling luas panennya sebesar 191 hektar. Selanjutnya, tanaman buah-buahan yang paling besar produksinya pada tahun 2005 masih sama dengan kondisi tahun sebelumnya, yaitu pisang, disusul durian, jeruk siam, dan nangka atau cempedak.

Sebagian besar lahan sawah yang ada di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 masih bergantung pada pengairan tanah hujan. Ini terlihat

dari besarnya luas lahan yang masih menggunakan pengairan tadah hujan, yaitu sebesar 7.800 hektar. Selain itu, jenis pengairan yang juga banyak digunakan adalah jenis pengairan desa dan setengah teknis. Lahan sawah di Kabupaten Bengkayang yang menggunakan jenis pengairan desa adalah sebesar 4.192 hektar, sedangkan yang menggunakan pengairan setengah teknis adalah sebesar 2.526 hektar. Masih sedikit sekali petani sawah di Kabupaten Bengkayang yang sudah menggunakan sawah irigasi teknis sehingga mengakibatkan keberhasilan panen masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan kebanyakan petani hanya bergantung pada kondisi musim yang baik dan teratur. Jika kondisi musim tidak menentu, maka usaha para petani akan terhambat sehingga akan mengurangi jumlah panen yang diharapkan pada akhirnya.

Sebagian besar lahan kering di Kabupaten Bengkayang selama tahun 2005 merupakan hutan negara, yaitu sebesar 189.912 hektar, disusul lahan kering berupa lahan sementara tidak diusahakan sebesar 81.714 hektar, berupa hutan rakyat sebesar 77.001 hektar, berupa tegal/kebun/huma sebesar 20.394 hektar, untuk lain-lain sebesar 12.339 hektar, berupa rawa-rawa sebesar 7.634 hektar, berupa kolam/empang sebesar 1.183 hektar, berupa padang rumput sebesar 808 hektar, dan sisanya berupa tambak sebesar 325 hektar.

2. Perkebunan dan Kehutanan

Jenis tanaman perkebunan yang menjadi komoditas utama Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 adalah karet, kelapa dalam, kelapa sawit, kelapa hibrida, cengkeh, lada, kopi, kemiri dan kakao.

Produksi tanaman perkebunan yang terbesar di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 adalah karet, yaitu sebesar 22.120 ton dalam bentuk Sheet Angin dengan luas tanam sebesar 49.555 hektar. Kecamatan yang paling luas tanaman karetinya adalah Kecamatan Samalantan, yaitu sebesar 16.872 hektar. Produksi tanaman kelapa dalam adalah sebesar 2.400.000 dalam bentuk butiran dan sebesar 1.202 ton dalam bentuk kopra dengan luas tanamnya sebesar 4.906 hektar. Kecamatan yang paling luas tanaman kelapa dalamnya adalah Kecamatan Sungai Raya. Produksi tanaman kelapa hibrida adalah sebesar 114.000 ton dalam bentuk butiran dan sebesar 47 ton dalam bentuk kopra dengan luas tanamnya sebesar 247 hektar. Kecamatan yang paling luas tanaman kelapa hibridanya adalah Kecamatan Sanggau Ledo. Produksi tanaman kopi adalah sebesar 151 ton dalam bentuk biji kering dengan luas tanamnya sebesar 277 hektar. Kecamatan yang paling luas tanaman kopinya adalah Kecamatan Sanggau Ledo. Produksi tanaman cengkeh adalah sebesar 527 ton dalam bentuk asalan dengan luas tanamnya sebesar 936 hektar. Kecamatan yang paling luas tanaman cengkehnya adalah Kecamatan Sungai Raya. Produksi tanaman lada ada dua jenis, yaitu lada hitam dan lada putih. Untuk jenis lada hitam, produksinya adalah sebesar 431 ton, sedangkan produksi lada

putih adalah sebesar 1.006 ton dengan total area luas tanam (baik lada hitam maupun lada putih) sebesar 2.713 hektar. Kecamatan yang paling luas tanaman ladanya adalah Kecamatan Seluas. Produksi tanaman kakao pada tahun 2005 adalah sebesar 200 ton dalam bentuk biji kering dengan luas tanamnya sebesar 1.697 hektar. Kecamatan yang paling luas tanaman kakaonya adalah Kecamatan Sungai Raya. Produksi tanaman kelapa sawit adalah sebesar 104.440 ton dalam bentuk TBS dengan luas tanamnya sebesar 14.744 hektar. Kecamatan yang paling luas tanaman kelapa sawitnya adalah Kecamatan Ledo.

Jenis tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Bengkayang saat ini masih dirasa kurang dan perlu dikembangkan lagi. Untuk itu, para investor baik dari dalam maupun dari luar negeri yang bisa mengembangkan subsektor perkebunan khususnya di Kabupaten Bengkayang masih sangat diperlukan.

Berdasarkan data tahun 2005, kondisi hutan dirinci menurut statusnya adalah sebagai berikut: taman nasional/cagar alam/laut sebesar 45.543 hektar, hutan lindung sebesar 38.581 hektar, hutan produksi terbatas sebesar 43.628 hektar, hutan produksi konversi sebesar 7.760 hektar, dan hutan produksi biasa sebesar 87.351 hektar.

Data produksi hasil hutan yang dilaporkan pada tahun 2005 dengan produksi hasil hutan yang paling besar di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 tersebut adalah kayu olahan, yaitu sebesar 631,0802 m³ yang semuanya merupakan kayu temuan. Luas kawasan kritis pada tahun 2005

sebesar 235.626 hektar dengan pembagian yang berada di kawasan sebesar 88.722 hektar dan yang berada di luar kawasan sebesar 146.408 hektar.

3. Perikanan

Sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang terdiri dari perairan, baik berupa laut maupun sungai. Laut dan sungai-sungai yang mengalir di berbagai kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkayang merupakan suatu potensi yang baik untuk mengembangkan sektor perikanan, baik perikanan laut, perikanan umum, maupun budi daya. Namun demikian, pada kenyataannya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

Produksi di bidang perikanan ada beberapa jenis, antara lain: perikanan laut, perikanan perairan umum, ikan awetan, budidaya kolam, budidaya keramba, tambak udang, dan budidaya rumput laut. Produksi perikanan laut pada tahun 2005 sebesar 3.587 ton baik berupa ikan segar maupun udang basah. Selanjutnya, untuk jenis perikanan umum, produksinya sebesar 41,2 ton, jenis ikan awetan produksinya sebesar 100,4 ton, budidaya keramba sebesar 3,2 ton, produksi tambak udang sebesar 318,5 ton, dan produksi budidaya rumput laut sebesar 3,5 ton.

Karena sebagian besar produksi perikanan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 berasal dari perikanan laut, sebagian besar unit penangkapan ikan berada di Kecamatan Sungai Raya, yaitu sebanyak 112 unit perahu tanpa motor, 290 unit perahu motor tempel, dan 346 unit kapal motor.

Keterbatasan peralatan yang ada (masih bersifat tradisional) menyebabkan sektor perikanan belum maksimal untuk menjadi penopang perekonomian Kabupaten Bengkayang. Potensi yang dimiliki di bidang perikanan ini masih banyak yang belum tergali. Contohnya jenis budidaya ikan darat yang masih kurang diminati oleh masyarakat padahal kondisi geografis Kabupaten Bengkayang sangat mendukung.

Selain itu, peralatan yang dimiliki oleh para nelayan di Kabupaten Bengkayang juga masih bersifat tradisional sehingga banyak potensi perikanan laut yang dicuri oleh nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan laut Indonesia, khususnya Kabupaten Bengkayang. Untuk itu, penanganan yang serius terhadap masalah ini sangat diperlukan selain modal yang memadai guna memaksimalkan potensi perikanan yang ada.

4. Peternakan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Peternakan dan Kesehatan Hewan, diketahui bahwa populasi ternak besar yang paling dominan di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 adalah jenis ternak sapi potong, yaitu sebesar 9.355 ekor diikuti jenis ternak besar yang lainnya, yaitu kerbau. Jenis ternak kecil unggulan di Bengkayang adalah babi yang populasinya pada tahun 2005 adalah sebesar 10.944 ekor, diikuti jenis ternak kambing yaitu sebesar 7.800 ekor.

Jenis unggas yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Bengkayang adalah jenis ayam buras. Populasi unggas jenis ayam buras pada tahun 2005 adalah sebesar 253.992 ekor. Selanjutnya, jenis unggas

yang lain masing-masing adalah ayam pedaging sebesar 47.508 ekor, itik sebesar 7.685 ekor, dan ayam petelur sebesar 6.600 ekor. Jenis unggas ayam petelur baru mulai diusahakan di Kecamatan Sungai Raya, sedangkan jenis ayam pedaging sudah diusahakan di beberapa kecamatan, antara lain: Kecamatan Sungai Raya, Samalantan, Bengkayang, dan Sanggau Ledo. Unggas jenis lainnya diusahakan hampir tersebar secara merata di semua kecamatan di Kabupaten Bengkayang.

Pemotongan ternak besar dan kecil yang paling banyak selama tahun 2005 adalah babi, yaitu sebesar 3.661 ekor. Selanjutnya, pemotongan ternak unggas yang paling banyak adalah jenis ayam pedaging, yaitu sebanyak 51.003 ekor.

F. Industri, Listrik, dan Air Minum

1. Industri

Salah satu sektor yang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Bengkayang adalah sektor industri. Namun demikian, sektor ini belum terlalu menonjol dan berperan dalam perekonomian.

Pada tahun 2005, jumlah perusahaan industri dengan badan hukum jenis perseroan terbatas (PT) ada sebanyak 8 usaha, koperasi sebanyak 2 usaha, CV sebanyak 108 usaha, dan perusahaan perorangan sebanyak 299 usaha. Penggerak sektor industri di Kabupaten Bengkayang sebagian besar masih berupa industri rumah tangga dan industri kecil dan sampai saat ini, direkori jumlah usahanya juga belum tersedia. Banyaknya industri kecil

formal yang tercatat pada tahun 2005 sebanyak 92 unit usaha dan industri kecil non formal sebanyak 151 unit usaha.

**Tabel 6 Realisasi Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Di Kabupaten Bengkayang Tahun 2002-2005**

Bentuk Perusahaan	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Perseroan Terbatas (PT)	0	0	1	3
2. Koperasi	0	0	0	2
3. Persekutuan Komanditer (CV)	0	0	0	108
4. Firma (Fa)	0	0	0	0
5. Perusahaan perorangan	41	34	24	299
6. Badan usaha lainnya	0	0	0	0
Jumlah	4	34	25	417

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bengkayang

2. Listrik

Kebutuhan listrik masyarakat Bengkayang dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya Kabupaten Bengkayang. Pada tahun 2005, jumlah pelanggan listrik yang ada sebanyak 208.160 pelanggan dengan total produksi listrik sebesar 2.962.821 Kwh atau rata-rata sebesar 246.902 Kwh per bulan. Dilihat dari jenis pelanggannya, pelanggan jenis rumah tangga ada sebanyak 13.142, diikuti jenis usaha 695 pelanggan, jenis industri sebanyak 1 pelanggan, jenis badan sosial sebanyak 419 pelanggan dan jenis perkantoran sebanyak 92 pelanggan.

Produksi listrik yang terjual oleh PLN ranting Bengkayang selama tahun 2004 adalah sebesar 17.496.417 Kwh. Ini berarti PLN telah menjual daya rata-rata sebesar 1.458.035 Kwh setiap bulannya. Dari sejumlah

produksi listrik yang terjual tersebut, diketahui bahwa nilai penjualannya adalah sebesar 9.685.745.780 rumah.

Sumber listrik Kabupaten Bengkayang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) baik dari pembangkit listrik Bengkayang maupun pembangkit listrik Singkawang. Selain itu, juga terdapat Lisdes di Desa Pulau Lemukutan Kecamatan Sungai Raya dan di Desa Cempaka Putih Kecamatan Suti Semarang. Dengan semakin meningkatnya jumlah pelanggan dan kebutuhan listrik yang ada, perlu diupayakan sumber tenaga listrik yang lain agar dapat digunakan sebagai tenaga alternatif jika pembangkit listrik yang ada sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Bengkayang. Ditambah lagi, pembangkit listrik yang ada saat ini sudah dirasa tidak cukup lagi untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang.

3. Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan hidup paling pokok bagi seluruh masyarakat. Penyedia kebutuhan air bersih Kabupaten Bengkayang adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Air bersih yang diproduksi oleh PDAM diharapkan dapat menjadi air baku yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum dan memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 adalah sebesar 928 pelanggan. Dilihat dari jenis pelanggannya, jumlah pelanggan jenis sosial umum adalah sebanyak 28, diikuti 40 pelanggan sosial khusus, 272 pelanggan

rumah tangga A, 324 pelanggan rumah tangga B, 159 pelanggan niaga kecil, 97 pelanggan niaga besar, 6 pelanggan instansi pemerintah dan 2 pelanggan industri kecil. Secara keseluruhan, jumlah air yang didistribusikan kepada pelanggan oleh PDAM selama tahun 2004 adalah sebanyak 19.966 m³ dengan nilai penjualan sebesar 30.504.925 rupiah.

G. Transportasi dan Komunikasi

1. Transportasi

Jalan merupakan prasarana pengangkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Semakin meningkatnya usaha pembangunan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu-lintas dari satu daerah ke daerah yang lain.

Panjang jalan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 adalah 2.019,72 km. Dari keseluruhan panjang jalan tersebut, tercatat 35,29 km merupakan jalan negara, 208,37 km merupakan jalan propinsi, 851,53 km merupakan jalan kabupaten, dan 924,53 km merupakan jalan dengan status jalan lainnya.

Dilihat dari kondisi permukaan jalan, sebagian besar jalan yang ada di Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 adalah jalan dengan jenis permukaan aspal sepanjang 514,79 km, kerikil sepanjang 126,31 km, tanah sepanjang 414,89 km, dan 963,73 km jenis permukaan lainnya. Namun demikian, kondisi jalan yang ada di Kabupaten Bengkayang

tersebut sudah dapat dikatakan semakin baik karena terjadi penambahan panjang jalan yang sudah diaspal atau dikeraskan setiap tahunnya. Dilihat dari kondisinya, jalan yang kondisinya baik adalah sepanjang 230,92 km, kondisi jalan sedang sepanjang 255,68 km, kondisi jalan rusak ringan sepanjang 270,65 km, dan kondisi jalan rusak berat sepanjang 1.262,47 km. Dilihat dari kelas jalan yang ada, jalan yang masuk dalam kelas jalan jenis II-C sepanjang 243,66 km, kelas jalan jenis III sepanjang 851,53 km dan yang tidak terinci sepanjang 924,53 km.

2. Pos dan Komunikasi

Pada tahun 2005, terdapat 6 kantor pos di seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang. Semua kantor pos tersebut masing-masing terdapat di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Samalantan, Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Ledo, Kecamatan Sanggau Ledo, dan Kecamatan Seluas.

Selama tahun 2005, tercatat pengguna jasa telekomunikasi di Kabupaten Bengkayang hanya ada sebanyak 741 pelanggan telkom dari 904 kapasitas sentral yang ada. Selain itu, terdapat juga 15 wartel yang tersebar di berbagai kecamatan, antara lain: di Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Ledo, Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Seluas, dan Kecamatan Jagoi Babang.

3. Perhotelan

Hotel atau penginapan merupakan salah satu sarana akomodasi yang penting khususnya dalam sektor pariwisata. Pada tahun 2005, tercatat

7 penginapan di Kabupaten Bengkayang, yaitu 4 penginapan terdapat di Kecamatan Bengkayang, 1 penginapan di Kecamatan Sanggau Ledo, dan 2 penginapan di Kecamatan Seluas. Dari seluruh penginapan yang ada, hanya tersedia 91 kamar.

H. Keuangan

1. Perbankan

Lembaga keuangan khususnya bank mempunyai peranan penting untuk mengefektifkan mobilitas dana-dana masyarakat ke dalam tujuan yang produktif. Pada tahun 2005, terdapat 3 bank yang beroperasi di Kabupaten Bengkayang. Ketiga bank tersebut antara lain adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bengkayang, Bank Kalbar Cabang Bengkayang, dan Bank Nasional Indonesia (BNI) 1946 unit Bengkayang.

Selama tahun 2005, jumlah dana yang berhasil dihimpun bank umum cabang Bengkayang adalah sebesar 862.600 juta rupiah baik yang berupa deposito, giro, maupun tabungan. Dari sejumlah dana tersebut, yang berbentuk giro adalah sebesar 405.117 juta rupiah, yang berbentuk deposito sebesar 189.124.000.000 rupiah, dan yang berbentuk tabungan sebesar 79.889 juta rupiah, dan yang berbentuk tabungan sebesar 377.594 rupiah. Total nasabah yang terdaftar selama tahun 2005 di bank yang ada di Kabupaten Bengkayang adalah sebanyak 114.389 nasabah.

Jumlah dana yang disalurkan selama tahun 2005 oleh bank umum cabang Bengkayang adalah sebesar 1.072.944 juta rupiah. Dari sejumlah

dana yang disalurkan, sebesar 301.391 juta rupiah disalurkan untuk modal kerja, sebesar 417.163 juta rupiah disalurkan untuk investasi, dan sebesar 354.290 juta rupiah disalurkan untuk konsumsi rumah tangga.

Dari tahun ke tahun, kesadaran masyarakat Kabupaten Bengkayang akan pentingnya menabung semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa jasa perbankan semakin dipercaya oleh masyarakat untuk berbagai transaksi keuangan terutama karena tingkat keamanannya yang lebih terjamin. Semakin banyaknya jumlah penabung, jumlah dana yang dihimpun serta dana yang digunakan oleh masyarakat menunjukkan semakin maju dan berkembangnya perekonomian Kabupaten Bengkayang. Hal ini dikarenakan salah satu indikator yang menunjukkan semakin majunya suatu daerah adalah adanya perputaran uang dalam kegiatan ekonomi yang berjalan dengan lancar termasuk dalam bidang perbankan.

2. Keuangan Daerah

Besar kecilnya anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian masyarakat. Anggaran yang berimbang dapat menjamin stabilitas perekonomian. Oleh karena itu, realisasi pendapatan dan pengeluaran suatu wilayah perlu dipantau dan dievaluasi.

**Tabel 7 Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2003
(dalam rupiah)**

No.	Jenis Penerimaan	Banyaknya
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	19.940.658.885,05
2.	Pendapatan Asli Daerah	3.954.425.722,85
	a. Pajak Daerah	315.613.363,19
	b. Retribusi Daerah	303.429.300,00
	c. Bagi laba Usaha Daerah	0,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	3.331.383.059,66
3.	Dana Perimbangan	144.166.110.289,00
	a. Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak	10.981.520.291,00
	b. Dana Alokasi Khusus	9.438.905.000,00
	c. Dana Perimbangan dari Propinsi	4.379.838.300,00
	d. Dana Alokasi Umum	123.745.684.998,00
4.	Pinjaman Daerah	0,00
	a. Pinjaman Dalam Negeri	0,00
	b. Pinjaman Luar Negeri	0,00
5.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5.327.002.347,00
	Jumlah	177.768.035.543,90

Sumber : Bagian Keuangan Kabupaten Bengkayang

**Tabel 8 Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2004
(dalam rupiah)**

No.	Jenis Penerimaan	Banyaknya
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	25.231.235.669,90
2.	Pendapatan Asli Daerah	4.299.888.051,49
	a. Pajak Daerah	186.615.669,22
	b. Retribusi Daerah	369.462.915,00
	c. Bagi laba Usaha Daerah	384.419.261,97
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	3.359.390.205,30
3.	Dana Perimbangan	162.665.132.570,75
	a. Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak	13.564.717.481,00
	b. Dana Alokasi Khusus	15.340.000.000,00
	c. Dana Perimbangan dari Propinsi	4.010.315.870,75
	d. Dana Alokasi Umum	129.750.099.219,00
4.	Pinjaman Daerah	0,00
	a. Pinjaman Dalam Negeri	0,00
	b. Pinjaman Luar Negeri	0,00
5.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	0,00
	Jumlah	192.196.256.292,14

Sumber : Bagian Keuangan Kabupaten Bengkayang

**Tabel 9 Realisasi Penerimaan Tahun Anggaran 2005
(dalam rupiah)**

No.	Jenis Penerimaan	Banyaknya
1.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	17.620.325.476,54
2.	Pendapatan Asli Daerah	3.566.513.836,34
	a. Pajak Daerah	451.509.579,48
	b. Retribusi Daerah	414.950.839,00
	c. Bagi laba Usaha Daerah	323.403.070,22
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	2.376.650.347,64
3.	Dana Perimbangan	180.091.574.303,94
	a. Bagi Hasil Pajak dan bukan pajak	15.733.922.599,00
	b. Dana Alokasi Khusus	16.203.902.000,00
	c. Dana Perimbangan dari Propinsi	5.225.749.704,94
	d. Dana Alokasi Umum	142.928.000.000,00
4.	Pinjaman Daerah	0,00
	a. Pinjaman Dalam Negeri	0,00
	b. Pinjaman Luar Negeri	0,00
5.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	4.390.240.328,00
	Jumlah	205.668.653.944,82

Sumber : Bagian Keuangan Kabupaten Bengkayang

**Tabel 10 Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2003
(dalam rupiah)**

No.	Jenis Pengeluaran Rutin	Banyaknya
1.	Belanja Pegawai	46.508.582.306,00
2.	Belanja Barang	23.302.503.874,00
3.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	1.856.719.355,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	4.227.221.464,00
5.	Belanja Lain-lain	5.449.219.299,00
6.	Angsuran Hutang dan Bunga	0,00
7.	Pensiun dan Onderstand	0,00
8.	Bantuan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	1.566.040.000,00
9.	Pengeluaran Tidak Termasuk Pada Bagian Lain	4.145.036.375,00
10.	Pengeluaran Tidak Tersangka	2.675.538.142,00
	Jumlah	89.730.860.815,00

Sumber : Bagian Keuangan Kabupaten Bengkayang

**Tabel 11 Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004
(dalam rupiah)**

No.	Jenis Pengeluaran Rutin	Banyaknya
1.	Belanja Pegawai	29.978.043.963,30
2.	Belanja Barang	4.860.275.027,00
3.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	1.706.968.445,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	3.800.921.990,00
5.	Belanja Lain-lain	34.364.475.600,00
6.	Angsuran Hutang dan Bunga	0,00
7.	Pensiun dan Onderstand	0,00
8.	Bantuan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	9.324.531.436,00
9.	Pengeluaran Tidak Termasuk Pada Bagian Lain	0,00
10.	Pengeluaran Tidak Tersangka	7.829.053.958,00
	Jumlah	91.864.270.419,30

Sumber : Bagian Keuangan Kabupaten Bengkayang

**Tabel 12 Realisasi Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2005
(dalam rupiah)**

No.	Jenis Pengeluaran Rutin	Banyaknya
1.	Belanja Pegawai	28.006.370.919,00
2.	Belanja Barang	6.659.118.434,00
3.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	2.373.986.883,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	4.422.257.900,00
5.	Belanja Lain-lain	8.611.614.693,00
6.	Angsuran Hutang dan Bunga	0,00
7.	Pensiun dan Onderstand	0,00
8.	Bantuan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	11.265.742.370,00
9.	Pengeluaran Tidak Termasuk Pada Bagian Lain	0,00
10.	Pengeluaran Tidak Tersangka	3.955.437.000,00
	Jumlah	65.294.528.199,00

Sumber : Bagian Keuangan Kabupaten Bengkayang

I. Pendapatan Regional

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kebijaksanaan dan usaha yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, meratakan distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan regional, dan usaha melakukan pergeseran kegiatan sektor ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder. Untuk itu, dinamika perekonomian harus tumbuh dengan mantap dan berkesinambungan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun tertentu dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari tahun sebelumnya, PDRB dihitung dari dua pendekatan harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. Total PDRB menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

Menurut Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2005 (2005: 343), PDRB Kabupaten Bengkayang atas dasar harga berlaku pada tahun 2004 adalah sebesar 1.057.441,03 juta rupiah dan meningkat menjadi 1.272.128,52 juta rupiah pada tahun 2005. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku yang terjadi antara tahun 2004-2005 adalah sebesar 20,30%. Selanjutnya, PDRB Kabupaten Bengkayang atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2004 adalah sebesar 821.207,47 juta rupiah dan naik menjadi 895.704,52 juta rupiah pada tahun 2005. Berdasarkan PDRB atas

dasar harga konstan 2000, perekonomian Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 tumbuh sebesar 9,07% dibanding dengan pertumbuhan perekonomian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 6,68%. Ini berarti bahwa perekonomian Kabupaten Bengkayang mengalami banyak kemajuan.

Jika dilihat per sektornya maka sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Bengkayang adalah sektor pertanian diikuti sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Bengkayang tahun 2005 adalah sebesar 42,67%, sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi sebesar 27,90%, pada tahun 2005. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Bengkayang masih bersifat agraris karena kontribusi tersebut paling besar dibanding dengan sektor yang lain. Dengan kata lain, penopang utama perekonomian masih berasal dari sektor pertanian. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sektor perekonomian yang mempunyai kontribusi pada PDRB Kabupaten Bengkayang masih relatif sama.

PDRB berkapita Kabupaten Bengkayang pada tahun 2005 adalah sebesar 6.179.070,61 rupiah dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan sebesar 16,67%. Peningkatan PDRB berkapita ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang semakin baik.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar agar dapat melaksanakan otonomi daerah. Dengan tingkat kemandirian daerah yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan .

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial untuk dapat melaksanakan pembangunan daerah. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang pasti diperoleh suatu daerah. Besar kecilnya PAD suatu daerah menunjukkan seberapa besar daerah tersebut mampu membiayai dirinya sendiri.

Data-data yang digunakan dalam analisis ini adalah:

1. Data target dan realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2003-2005 yang tercantum pada lampiran.
2. Data penerimaan daerah tahun anggaran 2003-2005 yang tercantum pada tabel 7, 8, dan 9 di halaman 72-73.
3. Data pengeluaran rutin tahun anggaran 2003-2005 yang tercantum pada tabel 10, 11, dan 12 di halaman 74-75.

B. Analisis Data

1. Peranan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap struktur penerimaan daerah ditinjau dari kontribusi PAD.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Langkah-langkah untuk menghitung seberapa besar rata-rata kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah adalah:

- a. Mengumpulkan data mengenai PAD dan TPD yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.

**Tabel 13 Realisasi PAD dan TPD
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005
(dalam rupiah)**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi TPD
2003	3.954.425.722,85	177.768.035.543,90
2004	4.299.888.051,49	192.196.256.292,14
2005	3.566.513.836,34	205.668.653.944,82

Sumber: Dispenda Kabupaten Bengkayang

- b. Melakukan analisis rasio kontribusi dengan cara membandingkan PAD dengan TPD dikalikan 100%. Berikut ini adalah penghitungan dan hasil yang diperoleh dari analisis PAD terhadap TPD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.

1). Tahun 2003

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{TPD}} \times 100\% \\ &= \frac{3.954.425.722,85}{177.768.035.543,90} \times 100\% \\ &= 2,22\% \end{aligned}$$

2). Tahun 2004

$$\begin{aligned} &= \frac{4.299.888.051,49}{192.196.256.292,14} \times 100\% \\ &= 2,24\% \end{aligned}$$

3). Tahun 2005

$$\begin{aligned} &= \frac{3.566.513.836,34}{205.668.653.944,82} \times 100\% \\ &= 1,73\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan di atas dapat dilihat pada Tabel 14 berikut ini:

**Tabel 14 Kontribusi PAD terhadap TPD
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005
(dalam rupiah)**

Tahun (a)	Realisasi PAD (b)	Penerimaan Daerah (c)	Kontribusi (%) (b/c)
2003	3.954.425.722,85	177.768.035.543,90	2,22%
2004	4.299.888.051,49	192.196.256.292,14	2,24%
2005	3.566.513.836,34	205.668.653.944,82	1,73%
Rata-Rata			2,06%

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 14 di atas dapat disimpulkan bahwa PAD hanya memberikan rata-rata kontribusi sebesar 2,06% pertahun terhadap struktur penerimaan daerah di Kabupaten Bengkayang. Dana

perimbangan masih memegang peranan terpenting untuk membiayai pengeluaran daerah. Hal ini memperlihatkan peranan yang sangat kecil, dan ini berarti potensi ekonomi Kabupaten Bengkayang belum mampu mencukupi kebutuhan daerahnya dalam melaksanakan otonomi daerah.

2. Peranan Pendapatan asli daerah terhadap struktur penerimaan daerah ditinjau dari efektivitas PAD.

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk mengukur efektif tidaknya pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya, dapat dilihat dari rasio efektivitas yang dicapai. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%, sehingga apabila rasio efektivitas semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Efektivitas dihitung dengan membandingkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung seberapa besar rata-rata efektivitas pemungutan PAD:

- a. Mengumpulkan data mengenai realisasi PAD dan target PAD yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005.

**Tabel 15 Realisasi dan Target PAD
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005
(dalam rupiah)**

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD
2003	3.954.425.722, 85	1.771.925.000,00
2004	4.299.888.051,49	2.084.925.000,00
2005	3.566.513.836,34	2.099.900.000,00

Sumber: *Dispenda Kabupaten Bengkayang*

- b. Melakukan analisis rasio efektivitas dengan cara membandingkan realisasi PAD dengan target PAD dikalikan 100%
berikut ini adalah perhitungan dan hasil yang diperoleh dari analisis realisasi PAD terhadap target PAD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005:

- 1). Tahun 2003

$$\begin{aligned}
 \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \\
 &= \frac{3.954.425.722,85}{1.771.925.000,00} \times 100\% \\
 &= 223,17\%
 \end{aligned}$$

- 2). Tahun 2004

$$\begin{aligned}
 &= \frac{4.299.888.051,49}{2.084.925.000,00} \times 100\% \\
 &= 206,24\%
 \end{aligned}$$

3). Tahun 2005

$$= \frac{3.566.513.836,34}{2.099.900.000,00} \times 100\%$$

$$= 169,84\%$$

Hasil perhitungan diatas dapat dilihat pada Tabel 16 Berikut ini:

**Tabel 16 Rasio Efektivitas PAD
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005
(dalam rupiah)**

Tahun (a)	Realisasi PAD (b)	Target PAD (c)	Rasio Efektivitas (%) (b/c)
2003	3.954.425.722,85	1.771.925.000,00	223,17%
2004	4.299.888.051,49	2.084.925.000,00	206,24%
2005	3.566.513.836,34	2.099.900.000,00	169,84%
Rata-Rata			199,75%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 16 di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1). Rasio efektivitas pemungutan PAD di Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005 mengalami penurunan. Meskipun demikian, secara rata-rata pemungutan PAD tersebut dikategorikan sangat efektif karena berada dalam kisaran lebih dari 100%, yaitu mencapai 199,75% pertahun anggaran.
- 2). Pada tahun anggaran 2003, rasio efektivitas mencapai 223,17% yang berarti bahwa pada tahun anggaran tersebut, pemungutan PAD dikategorikan sangat efektif karena mencapai lebih dari 100%. Pada tahun anggaran ini, PAD ditargetkan sebesar 1.771.925.000,00 rupiah sedangkan realisasinya mencapai

3.954.425.722,85 rupiah. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan target sebesar 2.182.500.722,85 rupiah.

- 3). Pada tahun anggaran 2004, rasio efektivitas mencapai 206,24% yang berarti pada tahun tersebut terjadi penurunan sebesar 16,93% dari tahun anggaran 2003. Dari Tabel 16 di atas dapat kita lihat besarnya target PAD pada tahun 2004 sebesar 2.084.925.000,00 rupiah sementara besarnya realisasi mencapai 4.299.888.051,49 rupiah. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan target sebesar 2.214.963.051,49 rupiah. Meskipun terjadi penurunan sebesar 16,93% dari tahun anggaran sebelumnya, pada tahun ini rasio efektivitas tetap dikategorikan sangat efektif karena lebih dari 100%.
- 4). Pada tahun anggaran 2005, rasio efektivitas mencapai 169,84% yang berarti pada tahun ini kembali terjadi penurunan sebesar 36,40% dari tahun anggaran 2004. Pada tahun anggaran 2005 ini, PAD ditargetkan sebesar 2.099.900.000,00 rupiah sedangkan realisasi PAD sebesar 3.566.513.836,34 rupiah. Hal ini menunjukkan adanya kelebihan target sebesar 1.466.613.836,34. Meskipun terjadi penurunan sebesar 36,40% dari tahun anggaran sebelumnya, pada tahun anggaran 2005 rasio efektivitas dikategorikan efektif karena mencapai lebih dari 100%.

3. Analisis kemampuan pendapatan asli daerah dengan membandingkan parameter-parameter kemandirian daerah.

a. **Persentase PAD terhadap total penerimaan daerah.**

Langkah-langkah untuk menghitung persentase PAD terhadap total penerimaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data mengenai realisasi PAD dan total penerimaan daerah.

**Tabel 17 Realisasi PAD dan TPD
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-
2005
(dalam rupiah)**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi TPD
2003	3.954.425.722,85	177.768.035.543,90
2004	4.299.888.051,49	192.196.256.292,14
2005	3.566.513.836,34	205.668.653.944,82

Sumber: Dispenda Kabupaten Bengkayang

2. Melakukan analisis dengan membandingkan realisasi PAD dengan TPD.

a). Tahun 2003:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{TPD}} \times 100\% \\
 &= \frac{3.954.425.722,85}{177.768.035.543,90} \times 100\% \\
 &= 2.22 \%
 \end{aligned}$$

b). Tahun 2004

$$= \frac{4.299.888.051,49}{192.196.256.292,14} \times 100\%$$

$$= 2,24\%$$

c). Tahun 2005

$$= \frac{3.566.513.836,34}{205.668.653.944,82} \times 100\%$$

$$= 1,75\%$$

Hasil perhitungan di atas dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini:

**Tabel 18 Persentase PAD terhadap TPD
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-
2005
(dalam rupiah)**

Tahun (a)	Realisasi PAD (b)	Total Penerimaan Daerah (c)	(b/c) %
2003	3.954.425.722,85	177.768.035.543,90	2,22%
2004	4.299.888.051,49	192.196.256.292,14	2,24%
2005	3.566.513.836,34	205.668.653.944,82	1,73%
Rata-Rata			2,06%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 18 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata persentase PAD terhadap TPD adalah 2,06% dan dikategorikan kemampuan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkayang rendah sekali, karena berada dalam kisaran 0%-24,99% dan memiliki pola hubungan instruktif. Ini berarti potensi ekonomi daerah Kabupaten Bengkayang belum mampu mencukupi kebutuhan daerahnya dalam melaksanakan otonomi daerah.

b. Persentase PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Total Penerimaan Daerah.

Langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung persentase PAD dan dana bagi hasil terhadap total penerimaan daerah adalah sebagai berikut:

- 1). Mengumpulkan data PAD, dana bagi hasil, dan TPD

**Tabel 19 PAD dan Dana Bagi Hasil, dan TPD
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-
2005
(dalam rupiah)**

Tahun	PAD dan Dana Bagi Hasil	TPD
2003	14.935.946.013,85	177.768.035.543,90
2004	17.864.605.532,49	192.196.256.292,14
2005	19.300.436.435,34	205.668.653.944,82

Sumber: Dispenda Kabupaten Bengkayang

- 2). Melakukan analisis dengan membandingkan PAD dan dana bagi hasil terhadap TPD
 - a). Tahun 2003

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{PAD} + \text{bagi hasil}}{\text{TPD}} \times 100\% \\
 &= \frac{14.935.946.013,85}{177.768.035.543,90} \times 100\% \\
 &= 8,40\%
 \end{aligned}$$

b). Tahun 2004

$$= \frac{17.864.605.532,49}{192.196.256.292,14} \times 100\%$$

$$= 9,29\%$$

c). Tahun 2005

$$= \frac{19.300.436.435,34}{205.668.653.944,82} \times 100\%$$

$$= 9,38\%$$

Hasil perhitungan di atas dapat dilihat pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 20 Persentase PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap TPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005 (dalam rupiah)

Tahun (a)	Realisasi PAD dan Dana Bagi Hasil (b)	Total Penerimaan Daerah (c)	(b/c) %
2003	14.935.946.013,85	177.768.035.543,90	8,40%
2004	17.864.605.532,49	192.196.256.292,14	9,29%
2005	19.300.436.435,34	205.668.653.944,82	9,38%
Rata-Rata			9,02%

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 20 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata persentase PAD dan dana bagi hasil terhadap TPD adalah 9,02% dan dikategorikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang rendah sekali, karena berada dalam kisaran 0%-24,99% dan memiliki pola hubungan instruktif. Penerimaan bagi hasil hanya memberikan kontribusi sebesar 6,96% dalam mencukupi kebutuhan daerahnya. Ini

berarti potensi ekonomi daerah Kabupaten Bengkayang belum mampu mencukupi kebutuhan daerahnya dalam melaksanakan otonomi daerah.

c. Persentase PAD terhadap pengeluaran rutin

PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk mencukupi pengeluaran rutin daerah. PAD merupakan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu indikator untuk melihat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah dilihat dari persentase PAD terhadap pengeluaran rutin.

Untuk mengetahui persentase PAD terhadap pengeluaran rutin digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

Langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung persentase PAD terhadap pengeluaran rutin adalah sebagai berikut:

- 1). Mengumpulkan data mengenai PAD dan pengeluaran rutin

**Tabel 21 PAD dan PR
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-
2005
(dalam rupiah)**

Tahun	Realisasi PAD	Pengeluaran Rutin
2003	3.954.425.722,85	89.730.860.815,00
2004	4.299.888.051,49	91.864.270.419,30
2005	3.566.513.836,34	65.294.528.199,00

Sumber: Dispenda Kabupaten Bengkayang

2). Melakukan analisis dengan membandingkan Realisasi PAD dengan Realisasi Pengeluaran Rutin.

a). Tahun 2003

$$= \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.954.425.722,85}{89.730.860.815,00} \times 100\%$$

$$= 4,41\%$$

b). Tahun 2004

$$= \frac{4.299.888.051,49}{91.864.270.419,30} \times 100\%$$

$$= 4,68\%$$

c). Tahun 2005

$$= \frac{3.566.513.836,34}{65.294.528.199,00} \times 100\%$$

$$= 5,46\%$$

Hasil perhitungan di atas dapat dilihat pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22 Persentase PAD terhadap PR Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005 (dalam rupiah)

Tahun (a)	Realisasi PAD (b)	Pengeluaran Rutin (c)	(b/c) %
2003	3.954.425.722,85	89.730.860.815,00	4,41%
2004	4.299.888.051,49	91.864.270.419,30	4,68%
2005	3.566.513.836,34	65.294.528.199,00	5,46%
Rata-Rata			4,85%

Sumber: Data diolah

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah secara mandiri, PAD Kabupaten Bengkayang harus mampu membiayai seluruh pengeluaran rutin daerah. Dari Tabel 22 di atas dapat diketahui Kabupaten Bengkayang memiliki rata-rata persentase PAD terhadap pengeluaran rutin sebesar 4,85% pertahun. Hal ini menunjukkan PAD Kabupaten Bengkayang secara rata-rata hanya mampu membiayai 4,85% dari keseluruhan pengeluaran rutin. Sehingga dapat disimpulkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang rendah sekali, karena berada dalam kisaran 0%-24,99% dengan pola hubungan instruktif. Kabupaten Bengkayang belum mampu membiayai sebagian besar pengeluaran rutin daerah.

d. Persentase PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengeluaran Rutin.

Langkah-langkah yang akan digunakan untuk menghitung persentase PAD dan dana bagi hasil terhadap pengeluaran rutin adalah sebagai berikut:

- 1). Mengumpulkan data mengenai PAD, dana bagi hasil, dan pengeluaran rutin.

**Tabel 23 PAD dan Dana Bagi Hasil dan PR
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-
2005
(dalam rupiah)**

Tahun	PAD dan Dana Bagi Hasil	Pengeluaran Rutin
2003	14.935.946.013,85	89.730.860.815,00
2004	17.864.605.532,49	91.864.270.419,30
2005	19.300.436.435,34	65.294.528.199,00

Sumber: Dispenda Kabupaten Bengkayang

- 2). Melakukan analisis dengan membandingkan PAD dan dana bagi hasil terhadap pengeluaran Rutin.

- a). Tahun 2003

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{PAD} + \text{bagi hasil}}{\text{Pengeluaran Rutin}} \times 100\% \\
 &= \frac{14.935.946.013,85}{89.730.860.815,00} \times 100\% \\
 &= 16,65\%
 \end{aligned}$$

- b). Tahun 2004

$$\begin{aligned}
 &= \frac{17.864.605.532,49}{91.864.270.419,30} \times 100\% \\
 &= 19,45\%
 \end{aligned}$$

- c). Tahun 2005

$$\begin{aligned}
 &= \frac{19.300.436.435,34}{65.294.528.199,00} \times 100\% \\
 &= 29,56\%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan di atas dapat dilihat pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24 Persentase PAD dan Dana Bagi Hasil terhadap PR Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005 (dalam rupiah)

Tahun (a)	Realisasi PAD dan dana bagi hasil (b)	Pengeluaran Rutin (c)	(b/c) %
2003	14.935.946.013,85	89.730.860.815,00	16,65%
2004	17.864.605.532,49	91.864.270.419,30	19,45%
2005	19.300.436.435,34	65.294.528.199,00	29,56%
Rata-Rata			21,88%

Sumber: Data diolah

Persentase PAD dan dana bagi hasil terhadap pengeluaran rutin di Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005 mengalami kenaikan. Meskipun demikian, secara rata-rata persentase PAD dan dana bagi hasil terhadap pengeluaran rutin tersebut dikategorikan sangat rendah karena berada dalam kisaran dari 0%-24,99%, yaitu mencapai 21,88% pertahun anggaran. Ini berarti secara rata-rata daerah mampu membiayai pengeluaran rutin sebesar 21,88%. Pada pola hubungan Instruktif ini, campur tangan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, karena daerah dianggap belum mampu melaksanakan otonomi.

e. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat adalah:

- 1). Mengumpulkan data mengenai pendapatan transfer dan total penerimaan daerah.

**Tabel 25 Pendapatan Transfer dan TPD
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-
2005
(dalam rupiah)**

Tahun	Pendapatan Transfer	Realisasi TPD
2003	137.564.423.298,00	177.768.035.543,90
2004	149.100.415.089,75	192.196.256.292,14
2005	164.357.651.704,94	205.668.653.944,82

Sumber: Dispenda Kabupaten Bengkayang

- 2). Melakukan analisis dengan membandingkan pendapatan transfer terhadap total penerimaan daerah.

- a). Tahun 2003

$$= \frac{137.564.423.298,00}{177.768.035.543,90} \times 100\%$$

$$= 77,38\%$$

- b). Tahun 2004

$$= \frac{149.100.415.089,75}{192.196.256.292,14} \times 100\%$$

$$= 77,58\%$$

- c). Tahun 2005

$$= \frac{164.357.651.704,94}{205.668.653.944,82} \times 100\%$$

$$= 79,91\%$$

Hasil perhitungan di atas dapat pada Tabel 26 berikut ini:

Tabel 26 Persentase Pendapatan Transfer terhadap TPD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005 (dalam rupiah)

Tahun (a)	Pendapatan Tranfer (b)	Realisasi TPD (c)	(b/c) %
2003	137.564.423.298,00	177.768.035.543,90	77,38%
2004	149.100.415.089,75	192.196.256.292,14	77,58%
2005	164.357.651.704,94	205.668.653.944,82	79,91%
Rata-Rata			78,29%

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 26 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan transfer memberikan kontribusi rata-rata sebesar 78,29% pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Bengkayang terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan belum mampu untuk menjadi daerah yang otonom.

4. Pertumbuhan PAD

Langkah-langkah yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan PAD adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data mengenai realisasi PAD.

Tabel 27 Realisasi PAD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005 (dalam rupiah)

Tahun	Realisasi PAD
2003	3.954.425.722,85
2004	4.299.888.051,49
2005	3.566.513.836,34

Sumber: Dispenda Kabupaten Bengkayang

b. Melakukan analisis dengan menghitung pertumbuhan PAD:

1). Tahun 2003

$$Q_{0,n} = \frac{\sum Q_n}{\sum Q_0} \times 100\%$$

$$Q_{2003} = \frac{3.954.425.722,85}{3.954.425.722,85} \times 100\%$$

$$Q_{2003} = 100\%$$

2). Tahun 2004

$$Q_{2003,2004} = \frac{4.299.888.051,49}{3.954.425.722,85} \times 100\%$$

$$Q_{2003,2004} = 108,74\%$$

3). Tahun 2005

$$Q_{2004,2005} = \frac{3.566.513.836,34}{4.299.888.051,49} \times 100\%$$

$$Q_{2004,2005} = 82,94\%$$

Hasil Perhitungan di atas dapat dilihat pada Tabel 28 berikut ini:

**Tabel 28 Pertumbuhan PAD
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005
(dalam rupiah)**

Tahun (a)	Realisasi PAD	Pertumbuhan PAD (%)
2003	3.954.425.722,85	100,00%
2004	4.299.888.051,49	108,74%
2005	3.566.513.836,34	82,94%
Rata-Rata		97,23%

Sumber: Data diolah

C. Pembahasan

Dari perhitungan dalam Tabel 14, terlihat bahwa secara rata-rata dalam kurun waktu tiga tahun (2003-2005) kontribusi PAD terhadap struktur penerimaan daerah sebesar 2,06%. Jika dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun kontribusi PAD terhadap struktur penerimaan daerah tidak mengalami perubahan yang mencolok. Akan tetapi, meskipun PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 2,06% terhadap struktur penerimaan daerah, pemungutan PAD di Kabupaten Bengkayang ini tergolong efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan rata-rata selama kurun waktu tiga tahun (2003-2005) yang terdapat pada Tabel 16, efektivitas PAD mencapai 199,75%.

Hasil perhitungan dengan membandingkan empat parameter kemandirian daerah yang terdiri dari persentase PAD terhadap TPD, persentase PAD dan dana bagi hasil terhadap TPD, persentase PAD terhadap pengeluaran rutin, dan persentase PAD dana bagi hasil terhadap pengeluaran rutin menunjukkan bahwa kemampuan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkayang masih sangat rendah karena berkisar antara 0%-24,99% dengan pola hubungan instruktif. Potensi ekonomi Kabupaten Bengkayang belum mampu mencukupi kebutuhan daerahnya dalam melaksanakan otonomi daerah. Perkembangan PAD dan penerimaan bagi hasil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi hal ini tidak sebanding jika dihubungkan dengan peningkatan untuk sisi pengeluaran, sehingga diperlukan subsidi dari pemerintah pusat untuk menyeimbangkan sisi penerimaan dan sisi

pengeluaran. hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang terhadap pemerintah pusat.

Dari hasil perhitungan yang terdapat dalam Tabel 26, dapat dilihat bahwa secara rata-rata dalam kurun waktu tiga tahun (2003-2005) tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang terhadap pemerintah pusat sebesar 78,29%. Ini berarti 78,29% kebutuhan daerah Kabupaten Bengkayang dipenuhi oleh pemerintah pusat.

PAD merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai salah satu kriteria dalam pemberian otonomi daerah. Pertumbuhan PAD di Kabupaten Bengkayang belum menunjukkan kondisi yang stabil. Dengan menggunakan tahun anggaran 2003 sebagai tahun dasar, dapat diketahui rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 97,23%. Pada tahun anggaran 2004, PAD mengalami kenaikan sebesar 8,74% dari tahun anggaran sebelumnya. Dan pada tahun anggaran 2005, PAD mengalami penurunan sebesar 25,80% dari tahun sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta data-data yang diperoleh dari BPKD Kabupaten Bengkayang, dengan melalui perhitungan dan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan, keterbatasan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. a. Kontribusi PAD terhadap struktur penerimaan daerah di Kabupaten Bengkayang rata-rata sebesar 2,06% pertahun. Hal ini menunjukkan peranan yang sangat kecil. Dana perimbangan masih memegang peranan terpenting untuk membiayai pengeluaran daerah. Dan dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi Kabupaten Bengkayang tidak mampu mencukupi kebutuhan daerahnya dalam melaksanakan otonomi daerah dan sangat tergantung pada pemerintah pusat. Keadaan ini menuntut adanya perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan PAD.
- b. Efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Bengkayang rata-rata setiap tahunnya dikategorikan efektif yaitu 199,75% pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pungutan PAD sudah cukup baik.
2. Jika dilihat dari rata-rata persentase PAD terhadap TPD, rata-rata persentase PAD dan dana bagi hasil terhadap TPD, rata-rata persentase

PAD terhadap pengeluaran rutin, dan rata-rata PAD dan dana bagi hasil terhadap pengeluaran rutin, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang dikategorikan rendah sekali, karena berada dalam kisaran 0%-24,99% dengan pola hubungan instruktif. Ini berarti potensi ekonomi daerah Kabupaten Bengkayang belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Proporsi penerimaan daerah yang paling tinggi berasal dari alokasi dana pemerintah pusat. Kontribusi dana pusat terhadap penerimaan daerah rata-rata setiap tahunnya mencapai 78,29%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkayang belum mandiri.

3. Pertumbuhan PAD menunjukkan kondisi yang tidak stabil. Dengan menggunakan tahun anggaran 2003 sebagai tahun dasar, dapat diketahui rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 97,23%.

B. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan dalam mengadakan penelitian, yaitu:

1. Penelitian ini mempunyai ruang lingkup yang sangat terbatas yaitu hanya berlaku pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pertumbuhan PAD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2003-2005 tidak diuji secara statistik.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dan penelitian berikutnya:

1. Saran Bagi Pemerintah Kabupaten Bengkayang
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang diharapkan mampu mempertahankan efektivitas pemungutan PAD serta berusaha terus meningkatkannya antara lain dengan cara:
 - 1). Pengoptimalan sarana objek wisata yang ada dan pengembangan objek wisata baru, seni dan budaya untuk meningkatkan PAD.
 - 2). Peningkatan sarana, prasarana serta kualitas SDM aparatur sehingga mampu melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab.
 - b. Dalam rangka meningkatkan PAD diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang mampu meningkatkan potensi ekonomi rakyat melalui penciptaan iklim wira usaha, pembinaan kemampuan berusaha, pengembangan promosi dan investasi daerah serta pembangunan sarana dan prasarana perdagangan.
 - c. Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan yang diarahkan untuk meningkatkan dan memperlancar mobilitas orang dan barang serta membuka daerah terisolir sehingga dapat memacu pertumbuhan daerah di segala aspek.

2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitian dan melakukan pengujian statistik untuk menguji pertumbuhan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedijowono, Noegroho. 2001. *Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, Syamsuddin (dkk). 2006. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI.
- Kabupaten Bengkayang Dalam Angka 2005*. 2005. Bengkayang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkayang.
- Kumpulan Peraturan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta: Deka Mandiri.
- Longdong, Debby Maria. 2004. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marbun, B.N. 2005. *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realiti: Perkembangan Otda, sejak Zaman colonial sampai saat ini*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pedoman Penulisan dan Ujian Skripsi. 2007. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Raba, Manggaukang. 2006. *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMM Pres.
- Spillane, James J. 2006. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Sanata Dharma.

- Supriady Bratakusumah, Deddy, Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- The Liang Gie. 1997. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Undang-Undang Otonomi Daerah. 2006. Jakarta: Presindo.
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana perkembangan situasi ekonomi di Kabupaten Bengkayang dari tahun 2003-2005?
2. Apa saja potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Bengkayang?
3. Ada berapa sektor yang ada di Kabupaten Bengkayang?
4. Upaya apa saja yang telah dan/atau akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah?
5. Apakah pemungutan pendapatan asli daerah telah berjalan dengan efektif?
6. Hal-hal apa saja yang menghambat perkembangan Kabupaten Bengkayang?

**Target penerimaan PAD
Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003-2005
(dalam rupiah)**

No.	Target Penerimaan PAD	2003	2004	2005
1.	Pajak Daerah	289.000.000,00	289.000.000,00	314.791.000,00
2.	Retribusi Daerah	318.675.000,00	331.675.000,00	319.106.000,00
3.	Bagi Laba Usaha Daerah	0,00	0,00	0,00
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	1.164.250.000,00	1.464.250.000,00	1.466.003.000,00
	Jumlah	1.771.925.000,00	2.084.925.000,00	2.099.900.000,00

Sumber: Bagian Keuangan Kabupaten Bengkayang

RINGKASAN SISA PERHITUNGAN APBD
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2005

NOMOR	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH BERKURANG	%
	PENDAPATAN	185.873.690.200,00	188.048.328.468,28	(2.174.638.268,28)	101,17%
	Pendapatan Asli Daerah	2.099.900.000,00	3.566.513.836,34	(1.466.613.836,34)	169,84%
1 1 1	Pajak Daerah	314.791.000,00	451.509.579,48	(136.718.579,48)	143,43%
1 1 2	Retribusi Daerah	319.106.000,00	414.950.839,00	(95.844.839,00)	130,04%
1 1 3	Bagi Laba Usaha Daerah	0,00	323.403.070,22	(323.403.070,22)	0,00%
1 1 4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah	1.466.003.000,00	2.376.650.347,64	(910.647.347,64)	162,12%
1 2	Dana Perimbangan	176.488.923.300,00	180.091.574.303,94	(3.602.651.003,94)	102,94%
1 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	11.869.740.300,00	15.733.922.599,00	(3.864.173.299,00)	132,55%
1 2 2	Dana Alokasi Umum	142.988.456.000,00	142.928.000.000,00	60.456.000,00	99,96%
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	16.203.902.000,00	16.203.902.000,00	0,00	100,00%
1 2 4	Dana Perimbangan dari Propinsi	5.426.816.000,00	5.225.749.704,94	201.066.295,06	96,29%
1 3	Lain - lain Pendapatan yang Sah	7.284.866.900,00	4.390.240.328,00	2.894.626.572,00	60,27%
	JUMLAH PENDAPATAN	185.873.690.200,00	188.048.328.468,28	(2.174.638.268,28)	101,17%
	BELANJA	200.625.384.900,00	151.354.162.822,00	49.271.222.078,00	75,44%
II	APARATUR DAERAH	58.501.141.000,00	49.960.248.455,00	8.540.792.545,00	85,40%
2 1	Belanja Administrasi Umum	39.418.372.800,00	22.684.144.119,00	2.060.536.481,00	91,67%
2 1 1	Belanja Pegawai/Personalia	24.744.680.600,00	5.927.052.800,00	1.012.932.450,00	85,40%
2 1 1 1	Belanja Pegawai/Personalia	6.539.965.250,00	4.231.009.900,00	526.490.350,00	89,70%
2 1 1 2	Belanja Barang dan Jasa	4.757.500.250,00	2.368.486.883,00	607.719.817,00	79,58%
2 1 1 3	Belanja Perjalanan Dinas	2.976.208.700,00			
2 1 1 4	Belanja Pemeliharaan				
2 1 2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	7.988.724.200,00	6.138.040.060,00	1.850.684.140,00	76,83%
2 1 2 1	Belanja Pegawai/Personalia	6.903.040.700,00	5.288.112.560,00	1.614.927.740,00	76,61%
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	827.896.500,00	653.179.100,00	174.717.400,00	78,90%
2 1 2 3	Belanja Perjalanan Dinas	252.287.000,00	191.248.000,00	61.039.000,00	75,81%
2 1 2 4	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	100,00%
2 1 3	Belanja Modal	11.094.044.000,00	8.611.614.693,00	2.482.429.307,00	77,62%
2 2	PELAYANAN PUBLIK	122.031.333.900,00	86.172.634.997,00	35.858.698.903,00	70,62%
2 2 1	Belanja Administrasi Umum	53.481.866.200,00	42.061.780.113,00	11.419.886.087,00	78,95%
2 2 1 1	Belanja Pegawai/Personalia	50.309.761.200,00	40.039.030.313,00	10.270.730.887,00	79,59%
2 2 1 2	Belanja Barang dan Jasa	1.726.075.000,00	995.138.800,00	730.936.200,00	57,65%
2 2 1 3	Belanja Perjalanan Dinas	1.023.835.000,00	763.414.800,00	270.416.000,00	73,59%
2 2 1 4	Belanja Pemeliharaan	422.000.000,00	274.197.000,00	147.803.000,00	64,98%
2 2 2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	14.456.164.600,00	10.026.845.842,00	4.429.318.758,00	69,39%
2 2 2 1	Belanja Pegawai/Personalia	11.165.814.350,00	7.255.431.102,00	3.910.383.248,00	64,98%
2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	2.492.469.250,00	2.159.480.260,00	332.988.990,00	86,64%
2 2 2 3	Belanja Perjalanan Dinas	617.286.000,00	437.705.400,00	179.580.600,00	70,91%
2 2 2 4	Belanja Pemeliharaan	189.595.000,00	174.229.080,00	6.365.920,00	96,48%
2 2 3	Belanja Modal	54.093.503.100,00	34.084.009.042,00	20.009.494.058,00	63,01%
2 3	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUAN	14.367.910.000,00	11.265.742.370,00	3.102.167.630,00	78,41%
2 4	BELANJA TIDAK TERSANGKA	6.725.000.000,00	3.955.437.000,00	1.769.563.000,00	69,09%
	JUMLAH BELANJA	200.625.384.900,00	151.354.162.822,00	49.271.222.078,00	75,44%
	SURPLUS/DEFISIT	(14.751.694.700,00)	36.694.165.646,28	(51.445.860.346,28)	26%
III	PEMBIAYAAN	14.751.694.700,00	(36.694.165.646,28)	51.445.860.346,28	180,21%
3 1	Penerimaan Daerah	15.251.694.700,00	17.620.325.476,54	(2.368.630.776,54)	115,53%
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 1 2	Transfer dari Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 1 3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 1 4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan Jumlah Penerimaan daerah	15.251.694.700,00	17.620.325.476,54	(2.368.630.776,54)	115,53%
3 2	Pengeluaran Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 2 1	Transfer ke dana cadangan	500.000.000,00	823.403.070,22	(323.403.070,22)	-64,68%
3 2 2	Penyerahan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	0,00	53.491.088.052,60	(53.491.088.052,60)	0,00%
3 2 4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Daerah	500.000.000,00	54.314.491.122,82	(53.814.491.122,82)	-64,68%
	JUMLAH PEMBIAYAAN	14.751.694.700,00	(36.694.165.646,28)	51.445.860.346,28	180,21%

An. BUPATI BENGKAYANG
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
Ub. Asisten Kab. Bengkayang
Ui. Kepala Bagian Keuangan

OBAJASEMSI
MID 270 619 447

**RINGKASAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

LAMPIRAN : C - 12
Halaman : 1

NO.	URAIAN	JUMLAH		PERSEN TASE	NO.	URAIAN	JUMLAH		PERSEN TASE
		ANGGARAN	REALISASI				ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8
I	PENERIMAAN				II	PENGELUARAAN			
A.	PENERIMAAN DARI DAERAH	170.796.956.834,00	19.940.658.885,05	144,32	A.	PENGELUARAN RUTIN	105.754.696.142,94	89.780.860.815,09	84,85
1	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN THN YG LALU	13.817.266.030,00	3.954.425.722,85	225,17	1	BELANJA PEGAWAI	63.531.510.242,94	46.508.582.306,00	73,21
2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.771.925.000,00	3.984.425.722,85	225,17	2	BELANJA BARANG	23.688.407.300,00	23.307.503.874,00	98,37
a.	Pajak Daerah	289.000.000,00	315.613.363,19	109,21	3	BELANJA OPERASI & PEMELIHARAAN	1.902.821.000,00	1.856.719.355,00	97,58
b.	Retribusi Daerah	318.675.000,00	307.429.300,00	96,47	4	BELANJA PERJALANAN DINAS	4.266.207.600,00	4.227.221.464,00	99,09
c.	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah & Hasil Pempol.	0,00	0,00	0,00	5	BELANJA LAIN-LAIN	4.978.250.000,00	5.449.219.299,00	109,46
d.	Lain-lain PAD Yang Sub	1.164.250.000,00	3.331.383.059,66	286,14	6	ANGSURAN HUTANG DAN BUNGA	0,00	0,00	0,00
3	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	147.707.765.800,00	144.166.110.289,00	97,60	7	PENSUR. DAN UNDERSTAND	0,00	0,00	0,00
a.	Bagi Hasil Pajak	7.500.000.000,00	10.480.962.834,00	139,71	8	BANTUAN BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	1.571.500.000,00	1.566.040.000,00	99,65
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	307.765.850,00	500.257.457,00	162,64	9	PENGELUARAN TIDAK TERMASUK PD BAG. LAIN	4.316.000.000,00	4.145.026.375,00	96,04
c.	Dana Alokasi Umum (DAU)	124.500.000.000,00	123.745.684.998,00	99,35	10	PENGELUARAN TIDAK TERSANGKA	1.800.000.000,00	2.675.538.142,00	148,37
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	15.340.000.000,00	9.438.905.000,00	61,53					
e.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	II	PENGELUARAN PEMBANGUNAN	69.924.156.000,00	63.214.034.038,09	90,40
4	BAGIAN PINJAMAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	1	SEKTOR INDUSTRI	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
a.	Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	2	SEKTOR PERTANIAN & KEHUTANAN	1.572.000.000,00	821.895.000,00	52,28
b.	Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	3	SEKTOR SUMBER DAYA AIR & IRRIGASI	11.886.800.000,00	11.885.065.000,00	99,99
5	BAGIAN PENERIMAAN DAERAH	7.500.000.000,00	9.706.540.647,09	129,42	4	SEKTOR TENAGA KERJA	71.000.000,00	70.570.000,00	99,56
a.	Penerimaan Dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	5	SEKTOR PERDAGANGAN/PENGEMBANGAN USAHA DAERAH KEUANGAN DAERAH & KOPERASI	644.000.000,00	6.152.000,00	95,99
b.	Penerimaan Dari Propinsi	7.500.000.000,00	4.379.838.300,00	58,40	6	SEKTOR TRANSPORTASI	12.968.000.000,00	12.871.389.267,00	99,26
c.	Penerimaan Dari Kabupaten/Kota Lainnya	0,00	0,00	0,00	7	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	136.000.000,00	135.915.177,00	99,94
d.	Penerimaan Lain-lainnya	0,00	5.327.002.347,09	#DIV/0!	8	SEKTOR PARIWISATA & TELEKOMUNIKASI DAERAH	210.000.000,00	209.792.000,00	99,90
					9	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMUKIMAN	1.050.000.000,00	1.049.500.000,00	99,95
					10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	1.600.156.000,00	251.166.000,00	15,70
					11	SEKTOR PENDIDIKAN/KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA & OLAH RAGA	10.121.500.000,00	10.113.456.500,00	99,92
					12	SEKTOR KESEHATAN/KESEJAHTERAAN SOSIAL, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	1.880.000.000,00	1.879.200.000,00	99,96
					13	SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	6.173.145.000,00	2.975.076.700,00	48,19
					14	SEKTOR AGAMA	322.300.000,00	322.700.000,00	100,06
					15	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	505.000.000,00	500.491.275,00	99,11
					17	SEKTOR HUKUM	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
					18	SEKTOR APARATUR PEMERINTAH DAN PENGAWASAN	20.544.055.000,00	19.243.030.119,00	93,67
					19	SEKTOR KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	60.000.000,00	60.462.000,00	100,77

**RINGKASAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

LAMPIRAN : C - 12
Halaman : 1

NO.	URAIAN	JUMLAH		PESEN TASE	NO.	URAIAN	JUMLAH		PERSEN TASE
		ANGGARAN	REALISASI				ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5	4	5			6
	JUMLAH PENERIMAAN	170.796.956.830,00	177.768.035.543,90	104,08		JUMLAH PENGELUARAAN	175.678.852.142,94	152.944.894.853,00	87,06
						BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN		0,00	
						TOTAL PENGELUARAN		152.944.894.853,00	
						SISA LEBIH		24.823.140.690,90	
						DEFISIT/SURFLUS			
					III	PEMBIAYAAN			
					1	PENERIMAAN DAERAH		0,00	
						a. sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu		0,00	
						b. Transfer dari Dana Cadangan		0,00	
						c. Hasil Penjualan dan Obligasi		0,00	
						d. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan		0,00	
					2	PENGELUARAN DAERAH	24.823.140.690,90		
						a. Transfer Ke Dana Cadangan		0,00	
						b. Perantara Modal		0,00	
						c. Pembiayaan Uang Pokok Jatuh Tempo		0,00	
						d.Sisa Perhitungan Lebih T.A 2003		24.823.140.690,90	
	JUMLAH	170.796.956.830,00	177.768.035.543,90	104,08		JUMLAH	175.778.852.140,94	177.768.035.543,90	

An. BUPATI BENGKAYANG
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu
Ub. Asisten Kab. Bengkulu
Ui. Kepala Bagian Keuangan

OBAJA, S.E.M.Si
NIP. 520 012 443

LAPORAN PERHITUNGAN APBD
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2004

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETEAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH BERKURANG	%
I	PENDAPATAN	158.831.867.800,00	166.965.020.622,24	(8.133.152.822,24)	105,12%
	Pendapatan Asli Daerah	2.084.925.000,00	4.299.888.051,49	(2.214.963.051,49)	405,39%
1 1 1	Pajak Daerah	289.000.000,00	186.615.669,22	102.384.330,78	64,57%
1 1 2	Retribusi Daerah	331.675.000,00	369.462.915,00	(37.787.915,00)	111,39%
1 1 3	Bagi Laba Usaha Daerah	0,00	384.419.261,97	(384.419.261,97)	0,00%
1 1 4	Lain - lain Pendapatan Asli Daerah	1.464.250.000,00	3.359.390.205,30	(1.895.140.205,30)	229,43%
1 2	Dana Perimbangan	156.746.942.800,00	162.665.132.570,75	(5.918.189.770,75)	484,35%
1 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	7.507.765.800,00	13.564.717.481,00	(6.056.951.681,00)	180,68%
1 2 2	Dana Alokasi Umum	130.039.177.000,00	129.750.099.219,00	289.077.781,00	99,78%
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	15.340.000.000,00	15.340.000.000,00	0,00	100,00%
1 2 4	Dana Perimbangan dari Propinsi	3.860.000.000,00	4.010.315.870,75	(150.315.870,75)	103,89%
1 3	Lain - lain Pendapatan yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	158.831.867.800,00	166.965.020.622,24	(8.133.152.822,24)	105,12%
II	BELANJA	181.045.113.837,90	174.572.891.236,30	52.777.602.724,60	1828,75%
2 1	APARATUR DAERAH	81.856.288.659,90	74.710.685.025,30	44.878.804.751,60	760,84%
2 1 1	Belanja Administrasi Umum	36.124.018.584,90	30.972.614.501,00	5.151.404.083,90	378,79%
2 1 1 1	1 Belanja Pegawai/Personalia	26.231.502.484,90	20.938.767.289,00	5.292.735.195,90	79,82%
2 1 1 2	2 Belanja Barang dan Jasa	4.244.541.540,00	4.579.867.777,00	(335.326.237,00)	107,90%
2 1 1 3	3 Belanja Perjalanan Dinas	3.865.399.560,00	3.800.921.990,00	64.477.570,00	98,33%
2 1 1 4	4 Belanja Pemeliharaan	1.782.605.000,00	1.653.057.445,00	129.547.555,00	92,73%
2 1 2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	10.923.957.000,00	9.373.594.924,30	1.550.362.075,70	283,33%
2 1 2 1	1 Belanja Pegawai/Personalia	10.584.077.000,00	9.039.276.674,30	1.544.800.325,70	85,40%
2 1 2 2	2 Belanja Barang dan Jasa	285.880.000,00	280.407.250,00	5.472.750,00	98,09%
2 1 2 3	3 Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00%

LAPORAN PERHITUNGAN APBD
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2004

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETEAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH BERKURANG	%
2 1 2 4 4	Belanja Pemeliharaan	54.000.000,00	53.911.000,00	89.000,00	99,84%
2 1 3	Belanja Modal	34.808.313.075,00	34.364.475.600,00	38.177.038.592,00	98,72%
2 2	PELAYANAN PUBLIK	85.652.202.178,00	99.862.206.211,00	11.515.760.367,00	790,75%
2 2 1	Belanja Administrasi Umum	42.853.872.178,00	40.761.950.032,00	2.091.922.146,00	395,95%
2 2 1 1	Belanja Pegawai/Personalia	40.291.929.778,00	38.177.038.592,00	2.114.891.186,00	94,75%
2 2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa	1.375.950.000,00	1.410.273.740,00	(34.323.740,00)	102,49%
2 2 1 3 3	Belanja Perjalanan Dinas	878.492.400,00	867.144.900,00	11.347.500,00	98,71%
2 2 1 4 4	Belanja Pemeliharaan	307.500.000,00	307.492.800,00	7.200,00	100,00%
2 2 2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	15.066.824.000,00	14.967.517.215,00	99.306.785,00	297,51%
2 2 2 1 1	Belanja Pegawai/Personalia	4.991.599.000,00	4.850.655.185,00	140.943.815,00	97,18%
2 2 2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	764.325.000,00	763.395.695,00	929.305,00	99,88%
2 2 2 3 3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 2 2 4 4	Belanja Pemeliharaan	9.310.900.000,00	9.353.466.335,00	(42.566.335,00)	100,46%
2 2 3	Belanja Modal	27.731.506.000,00	26.979.153.570,00	9.324.531.436,00	97,29%
2 3	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	9.036.623.000,00	9.324.531.436,00	(287.908.436,00)	103,19%
2 4	BELANJA TIDAK TERSANGKA	4.500.000.000,00	7.829.053.958,00	(3.329.053.958,00)	173,98%
	JUMLAH BELANJA	181.045.113.837,90	174.572.891.236,30	52.777.602.724,60	1828,75%
	SURPLUS/DEFISIT	(22.213.246.037,90)	(7.607.870.614,06)	(60.910.755.546,84)	5,75%
III	PEMBIAYAAN	22.213.246.037,90	7.607.870.613,06	14.605.375.424,84	13,80%
3 1	Penerimaan Daerah				
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	24.963.246.037,90	25.231.235.669,90	(267.989.632,00)	101,07%

**LAPORAN PERHITUNGAN APBD
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2004**

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETEAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH BERKURANG	%
3 1 2	Transfer dari Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 1 3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 1 4	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Jumlah Penerimaan daerah	24.963.246.037,90	25.231.235.669,90	(267.989.632,00)	101,07%
	Pengeluaran Daerah				
3 2 1	Transfer ke dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 2 2	Penyertaan Modal	2.750.000.000,00	2.400.000.000,00	350.000.000,00	87,27%
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 2 4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	0,00	15.223.365.056,84	(15.223.365.056,84)	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Daerah	2.750.000.000,00	17.623.365.056,84	(14.873.365.056,84)	87,27%
	JUMLAH PEMBIAYAAN	22.213.246.037,90	7.607.870.613,06	14.605.375.424,84	13,80%

An. BUPATI BENGKAYANG
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang
Ub. Asisten Kab. Bengkayang
Ui. Kepala Bagian Keuangan

OBAJA, SE.M.SI
NIP. 520 012 443



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jalan Guna Baru Rangkang Telp. (0562) 441807, 441554, 441553

Fax. (0562) 441808, 441057

BENGKAYANG Kode Pos 79282

Kepada

Nomor : 890/ ~~287~~ BPKD-A/2007
 Lamp : -
 Perihal : Surat Keterangan
Penulisan Skripsi.

Yth. Ketua Program Studi
 Universitas Sanata Dharma
 Fakultas Ekonomi
 di -

Yogyakarta.

Sehubungan dengan Surat Universitas Sanata Dharma Fakultas Ekonomi Yogyakarta Nomor : 31 / Kaprodi Akt / 147/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 perihal izin penelitian menerangkan bahwa :

Nama : K. Titis Kurniawati
 NIM : 002114250
 Program Studi : Akuntansi
 Jurusan : Akuntansi
 Semester : XIV

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

Lokasi : Badan Pengelola Keuangan Daerah
 Kabupaten Bengkayang
 Jalan Guna Baru Bengkayang Kalimantan Barat.

Waktu : Juli – Agustus 2007.

Judul penelitian : Analisis kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Telah dilakukan sesuai dengan mekanisme, prosedural, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dibelakang hari terjadi penyalahgunaan data yang diberikan menjadi tanggung jawab penulis.

Bengkayang, 27 Agustus 2007.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
 Sekretaris


H. BURHANUL PURKAN, SE. M.Si
 NIP. 520 012 393